



LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

TAHUN 2020



BAGIAN ORGANISASI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN REVIU	ii
IKHITISAR EKSEKUTIF	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN	1
1.1. Geografi.....	1
1.2. Demografi.....	3
2. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	7
2.1. Kewenangan.....	7
2.2 Struktur Organisasi	8
3. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA	10
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP	13
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
1. RENCANA STRATEGIS	15
1.1. Visi Kabupaten Pelalawan.....	15
1.2. Misi Kabupaten Pelalawan	17
2. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
1. CAPAIAN KINERJA.....	25
2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	29
3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 2018.....	72
BAB 4 PENUTUP.....	97
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggung jawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bukan sekedar menyatakan bahwa program dan kegiatan telah terlaksana, namun yang terpenting adalah apakah program dan kegiatan pemerintah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dampak yang mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban inilah yang disebut dengan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (performance Indicator). Tujuan utama akuntabilitas kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas publik instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja organisasi pemerintah serta meminimalkan peluang tercipta korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 tahun 2014. Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kabupaten Pelalawan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, dalam upaya memenuhi visi pembangunan : **"Inovasi Menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri, Aman & Sejahtera)"**

Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap segenap tingkatan Aparatur Negara Birokrasi yang telah melakukan berbagai langkah dan terobosan untuk kemajuan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim penyusun dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah turut membantu dalam penyusunan Laporan ini. Semoga laporan .. Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua.





PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI
Telp/Fax. (0761) 494287 – Email : Inspektorat.pelalawanriau@gmail.com
KODE POS : 28300

PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 30 Maret 2021



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN

MUHAMMAD IRSYAD. SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
1117 199703 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan menjanjikan berbagai pencapaian atas sasaran strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Berbagai capaian diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memantau capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah adalah dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online yang disebut dengan E-SAKIP (<http://lakip.pelalawankab.go.id>). Sistem tersebut perlu dipelihara serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan monitoring SAKIP.

Secara umum capaian kinerja utama tahun 2020 dari 17 Sasaran Strategis dan 31 Indikator Kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut: Sebanyak 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "Sangat Memuaskan", 3 (tiga) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "Memuaskan", 3 (tiga) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "Sangat Baik" dan 2 (dua) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "Baik" serta 1 (satu) Indikator Kinerja merupakan capaian kinerjanya "Cukup", atau 70,97 persen capaian kinerjanya telah sesuai/melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun	8,22	Sangat Memuaskan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,96	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	Indeks Pembangunan Budaya	0,81	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan masyarakat	71,61	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya kualitas Kesehatan Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan Hidup	66,00	Sangat Memuaskan
		Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	Cukup
6	Meningkatnya Ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung penyediaan dan pemanfaatan teknologi/inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	Indeks Inovasi Daerah	16	Sangat Baik
		Peringkat Pengelolaan Smart City	41,25	Baik
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Perhubungan	Indeks Aksebilitas Jalan	0,76	Sangat Memuaskan
		Angka Kecelakaan lalu lintas	165	Sangat Memuaskan
		Rata-rata waktu tempuh dari ibu kota Kecamatan ke ibu kota Kabupaten	1,63	Sangat Memuaskan
8	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,00	Sangat Memuaskan
		Rasio Desa teraliri Listrik (%)	90,00	Sangat Memuaskan

9	Meningkatnya Pembangunan Insfratraktur Kawasan Strategis Daerah	Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan (%)	41,25	Sangat Memuaskan
		Jumlah Kunjungan Kekawasan Wisata (orang)	96,666	Sangat Memuaskan
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, tarnsfaran dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	Opini Audit BPK(opini)	WTP	Sangat Memuaskan
		Nilai SAKIP	B	Sangat Memuaskan
		Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	ST	Sangat Baik
		Persentase Indikator SPM Daerah yang tercapai (%)	87,50	Sangat Baik
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	Sangat Memuaskan
		Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	84,22	Sangat Memuaskan
11	Meningkatnya jumlah Desa Maju dan Mandiri	Jumlah Desa dengan Kategori Mandiri (desa)	4	Sangat Memuaskan
12	Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan terkendalnya kesenjangan pendapatan	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5	Memuaskan
		Indeks Gini	0,32	Sangat Memuaskan
13	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Triliunan Rupiah)	107	Sangat Memuaskan
14	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Skor Pola pangan harapan (%)	91,74	Memuaskan
		Pengeluaran Perkapita Penduduk	11,900,89	Sangat Memuaskan
15	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (Miliyar Rupiah)	103,16	Memuaskan
16	Meningkatnya Tingkat Kriminalitas	Angka Kriminalitas	260	Baik
17	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis	Jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan	0,19	Sangat Memuaskan

BAB I PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

1.1 Geografi

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.924,94 Km² yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan di antaranya Pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dilihat dari posisinya, Kabupaten Pelalawan merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Di samping itu, Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun.

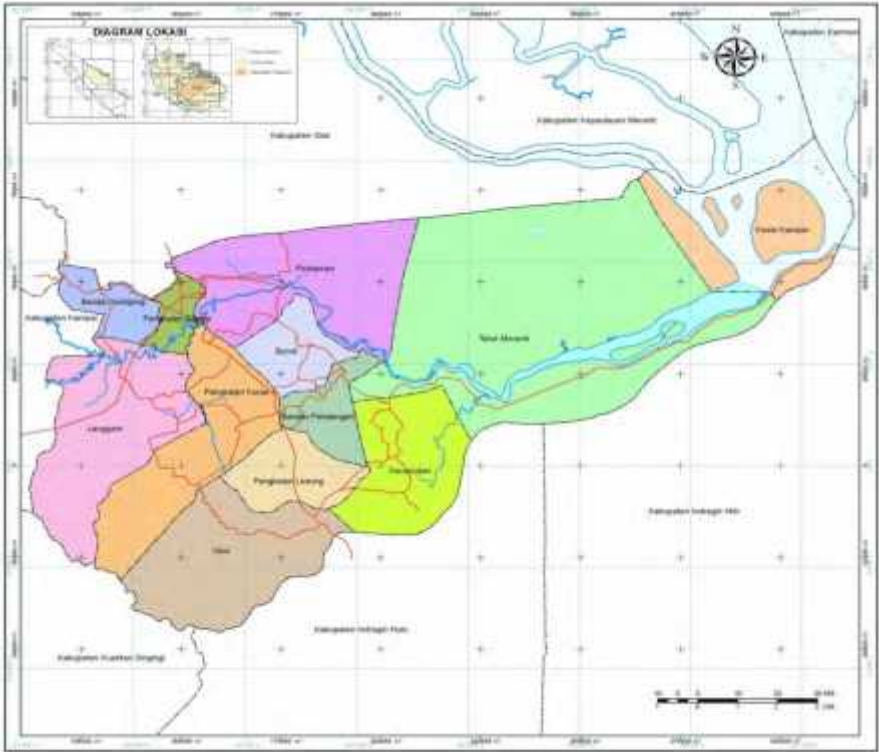
Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau Sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°20" LS serta antara 100°42" ~ 103°28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi & Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

(Sumber : Buku Statistik Sektor Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2020)

Gambar.1

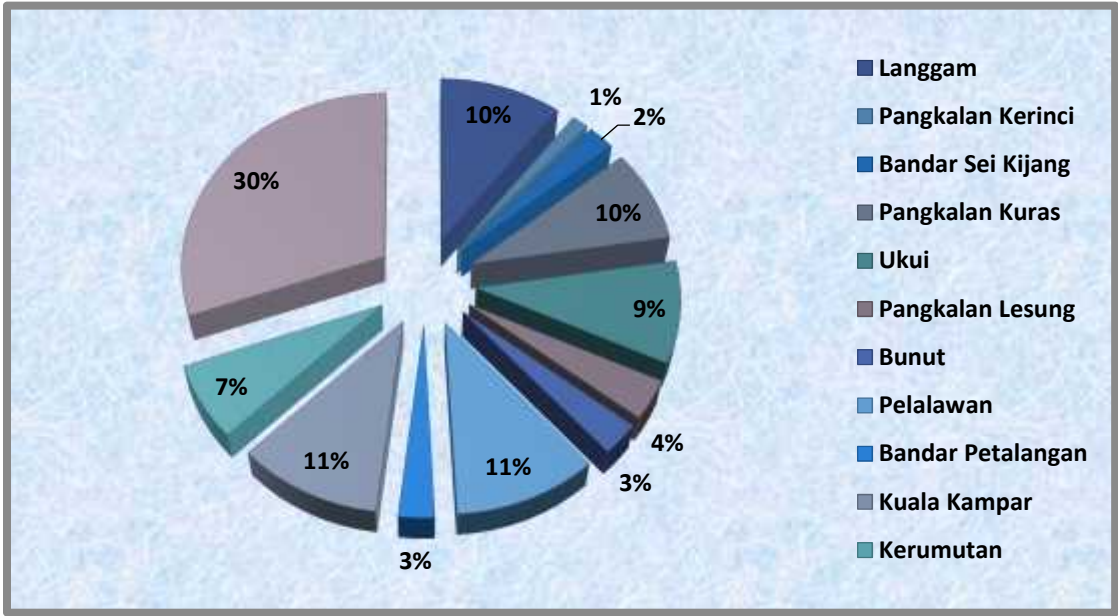
Peta Kabupaten Pelalawan



Sumber: (Sumber : Buku Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2020)

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan daratan. Sedangkan, perairan terdiri dari sungai dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, di antaranya Pulau Mendul Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu. Selain itu, wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423,984 Ha (30,45%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan Luas 19,355 Ha atau 1,19% dari luas Kabupaten Pelalawan

Grafik.2PersentaseLuas Wilayah AdministrasiPerKecamatan



Sumber: (Sumber : Buku Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Pelalawan, Diskominfo Tahun 2020

1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan BPS Pelalawan tahun 2020 adalah 483.622 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 247,994 jiwa dan perempuan 235,628 jiwa. Penduduk terbanyak berdomisi di Pangkalan Kerinci yaitu 144,915 jiwa dan terendah di Bandar Petalangan 14.646 jiwa.

Tabel.1
Luas Wilayah, JumlahPendudukdanKepadatanPendudukPer
Km²menurutKecamatanTahun 2020

Kecamatan / Sub-Regency	Luas (Km ²) / Area	Jumlahn Penduduk/Population	KepadatanPenduduk / Population Density
(1)	(2)	(3)	(4)
Langgam	1,476,29	34,927	23,66
PangkalanKerinci	217,26	144,915	667,01
Bandar SeiKijang	325,03	45,490	139,96
PangkalanKuras	1,224,55	63,370	53,38
Ukui	1,337,47	42,110	31,48
PangkalanLesung	438,08	34,412	78,55
Bunut	444,65	17,058	38,36
Pelalawan	1.469,38	21,391	14,56
Bandar Petalangan	361,85	14,464	40,48
Kuala Kampar	683,39	18,271	26,74
Kerumutan	976,31	26,332	26,97
TelukMeranti	4,113,03	18,700	4,55

Kecamatan / Sub-Regency		Luas (Km²) / Area	Jumlahn Penduduk/Population	KepadatanPenduduk / Population Density
Jumlah	2019	13,067,29	483,622	37,01
Total	2018	13,924,94	460,780	33

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020

Tabel.2

Jumlah Kelurahan dan Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah Km2	Status Pemerintahan		Jumlah	Jumlah Rukun Warga (RW)
			Kelurahan	Desa		
Langgam	Langgam	1,476,29	1	7	8	46
PangkalanKerinci	PangkalanKerinci	217,26	3	4	7	59
Bandar SeiKijang	SeiKijang	325,03	1	4	5	29
PangkalanKuras	SorekSatu	1,224,55	1	16	17	79
Ukui	UkuiSatu	1,337,47	1	11	12	67
PangkalanLesung	PangkalanLesung	438,08	1	9	10	61
Bunut	PangkalanBunut	444,65	1	9	10	51
Pelalawan	Pelalawan	1.469,38	1	8	9	51
Bandar Petalangan	LubukKerANJI	361,85	1	10	11	54
Kuala Kampar	Teluk Dalam	683,39	1	9	10	63
Kerumutan	Kerumutan	976,31	1	9	10	64
TelukMeranti	Teluk Meranti	4,113,03	1	8	9	57
Jumlah		13,067,29	14	104	118	645

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020

Tabel.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kecamatan / Sub-Regency	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Langgam	18,000	16,927	34,927
PangkalanKerinci	73,883	71,032	144,915
Bandar SeiKijang	23,510	21,980	45,490
PangkalanKuras	33,457	31,913	65,370
Ukui	22,054	20,056	42,110
PangkalanLesung	17,781	16,631	34,412
Bunut	8,589	8,469	17,058
Pelalawan	11,171	10,220	21,391
Bandar Petalangan	7,330	7,316	14,646
Kuala Kampar	9,310	8,961	18,271
Kerumutan	13,433	12,889	26,332
TelukMeranti	9,476	9,224	18,700
JUMLAH	247,994	235,628	483,622

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2020

BUPATI PELALAWAN & WAKIL BUPATI

Bupati Pelalawan dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2016-2021 terpilih Bapak H.M. Harris dan H.Zardewan yang dilantik pada tanggal 22 April 2016 memiliki visi dan misi yakni Visi Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dalam kurun waktu 2016-2021. Pencapaian cita-cita ini diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasarannya yang akan selalu diwarnai berbagai peluang dan tantangan masa depan yang perlu diantisipasi.

Misi Pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 memperlihatkan tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai visi Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati mempunyai visi dan misi diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran.

Bupati dan Wakil Bupati semasa kampanye Pilkada, mempunyai Visi, Misi dan masalah pembangunan serta isu-isu strategi Kabupaten Pelalawan yang tantangan lima tahun ke depan, dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang dimiliki,

Pembangunan merupakan basis utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus menggesa percepatan pembangunan di segala bidang yang tertuang dalam 7 (tujuh) program unggulan di 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

H.M. Harris mengatakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut, makanya dia meminta dengan tegas kepada seluruh Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan serius untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen untuk membangun prasarana dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan menengah serta prasarana sosial lainnya. Dan untuk mengejar kemajuan pembangunan tersebut, maka ditegaskan agar setiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat serius menjalani program/kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik.

Penanggulangan kemiskinan juga menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang dilakukan dengan cara menertibkan kebijakan dan pelaksanaan program-program pada pelayanan umum, namun demikian untuk mencapainya diperlukan suatu komitmen bersama dari seluruh stakeholder dengan budaya dan etos kerja masyarakat yang menjadikan seluruh unsur masyarakat menjadi aktif dan proaktif. Disamping itu Bupati Pelalawan bersama wakilnya, meminta agar hubungan kerjasama kemitraan dengan sesama stakeholder untuk pembangunan setempat dalam rangka membangun iklim dan budaya politik yang demokratis dan perlu ditingkatkan. Hal ini agar terjadi sinergi kebijakan dan sinkronisasi serta koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat.

Kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas adalah peningkatan pendapatan daerah dengan cara menertibkan langkah-langkah kebijakan yang bersahabat dengan pasar, sehingga tidak menimbulkan eksekusi ekonomi biaya tinggi. Untuk itu harapan kedepan mari sama-sama kita tingkatkan kemajuan pembangunan Negeri Seiya Sekata dengan Pro-aktif dalam mendukung semua program/kegiatan pembangunan daerah dengan Visi Inovasi Menuju Pelalawan EMAS (Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera).

Upaya H.M.Harris sebagai Bupati Pelalawan telah membuahkan hasil yang sangat menggembirakan, Beliau mendapatkan penghargaan antara lain :

1. Opini WTP Tahun 2020 yg kedelapan kalinya, dari BPK RI
2. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Anugerah INAGARA AWARD

3. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Piala Adipura Kategori KOTA KECIL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
4. Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Pelalawan Kategori " Terdefinisi" atau " Level 3 "
5. Penghargaan Nasional Procurement Award, Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE
6. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori PRATAMA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
7. Penghargaan Nasional dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tokoh Penggerak Literasi Nasional, khusus Peningkatan Kompetensi Guru.
8. Penghargaan Nasional dari Kementerian Kesehatan dinyatakan Bebas dari Eliminasi Penyakit Kaki Gajah (FILARIASIS)

2. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Kewenangan

Kabupaten Pelalawan sebagai daerah otonomi, memiliki kewenangan mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, peertahanan keamanan, yuridis , moneter dan fiskal nasional, agama serta kewenangan bidang lain seperti kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional .

Adapun beberapa kewenangan sasuai dengan amanat Undang-undang No 23 Tahun 2014 yaitu kewenangan pemerintah kabupaten meliputi : perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial, penanggulangan masalah sosial, pelayanan ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan usaha menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan

kepedudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah.

2.2 Struktur Organisasi

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Asisten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari :

SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7. Bagian Umum
8. Bagian Organisasi
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

STAF AHLI

1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Kemasyarakatan & Sumber Daya manusia
2. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

ASISTEN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum

SEKRETARIAT DPRD

1. Bagian Umum
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

PERANGKAT DAERAH

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Dinas Kesehatan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Dinas Tenaga Kerja
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8. Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
11. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Dinas Perkebunan dan Peternakan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Perikanan
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Inspektorat Daerah
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran

KECAMATAN

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci
2. Kecamatan Pangkalan Kuras
3. Kecamatan Bunut
4. Kecamatan Bandar Petalangan
5. Kecamatan Pangkalan Lesung
6. Kecamatan Ukui
7. Kecamatan Kerumutan
8. Kecamatan Teluk Meranti
9. Kecamatan Kuala Kampar
10. Kecamatan Bandar Sei.Kijang
11. Kecamatan Langgam
12. Kecamatan Pelalawan

3 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk

mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada system informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau sub system dari administrasi Negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas incremental budgeting system seharusnya sudah di tinggalkan. Sedangkan budget line system harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sistem AKIP ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dari Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2020 yang memiliki tujuan:

1. Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pemerintah pusat maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola

pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Esensi dari Sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah Perwujudan dari implementasi system pengendalian menejemen sektor publik di Kabupaten Pelalawan sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi mananjemen Pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan peyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Secara selaras setiaptahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah yang berhasil diperoleh.

Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Kinerja (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Laporan kinerja merupakan sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders,
2. Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun 2020. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sementara dari sudut pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang

bersifat penunjang. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, minimal sampai pada indikator input, output dan outcome.

Capaian Kinerja yang disajikan/digunakan untuk menentukan tingkatan kinerja ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

>90-100	: Sangat Memuaskan,	>80-90	: Memuaskan
>70-80	: Sangat Baik,	>60-70	: Baik
>50-60	: Cukup,	>30-50	: Kurang

4 SISTIMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan selama tahun 2020. Capaian kinerja (performance results) 2020 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2020 sebagai tolak kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kabupaten Pelalawan tahun 2020 dapat diuraikan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menjabarkan kondisi geografis dan demografi, kewenangan dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan serta sistematika penyusunan laporan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan kinerja yang direncanakan dan ditetapkan dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan di tahun 2020 yang berdasarkan rencana strategis dan misi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020 dan realisasi

anggaran yang digunakan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2020 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

1.1 . Visi Kabupaten Pelalawan

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, produktif dan inovatif. Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Pelalawan pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Pelalawan, yaitu :

“Inovasi Menuju Pelalawan Emas (EkonomiMandiri, Aman dan Sejahtera)”

Pengertian pokok-pokok visi diterjemahkan sebagai berikut:

- a. INOVASI merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang merujuk pada amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi juga merupakan upaya memacu kreatifitas daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang dilindungi tanpa ada kekhawatiran menjadi objek pelanggaran hukum. Inovasi merupakan

perubahan dan pembaharuan pola pelayanan dan pola kerja menjadi lebih efektif, efisien, terciptanya kreatifitas dan terobosan baru baik dalam pelayanan langsung ke masyarakat maupun dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

- b. PELALAWAN Merupakan Daerah Otonom atau wilayah administratif sesuai dengan undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902):
- c. EMAS Merupakan Akronim Dari Ekonomi Mandiri, Aman Dan Sejahtera yakni kondisi daerah yang memiliki perekonomian yang mandiri yang ditopang potensi dan kemampuan sumber daya daerah yang memiliki, keadaan yang aman dimana terjalinnya hubungan yang harmonis antar masyarakat, terciptanya kondusivitas daerah, serta sejahtera dalam arti terpenuhi kebutuhan material dan spritual masyarakat.

Inovasi Menuju Pelalawan EMAS berarti pembangunan yang didorong upaya, gerakan dan prakarsa inovatif menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri dalam ekonomi, aman dan sejahtera dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mandiri dalam ekonomi berarti memiliki komitmen dan konsistensi yang tinggi untuk memberdayakan kemampuan dan sumberdaya daerah.

Untuk mengukur tingkat capaian Pelalawan EMAS melalui gerakan inovatif ditetapkan kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi RPJMD

Tabel 2.1.
Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kabupaten Pelalawan
Tahun 2016-2021

INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,82	74,46
Persentase Tingkat Miskin	%	12,30	8,50
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	2,48	5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,61	3,50
Indeks Inovasi Daerah	Poin	5	8

1.2 Misi Kabupaten Pelalawan

Untuk Mencapai Visi Inovasi Menuju Pelalawan EMAS(Ekonomi Mandiri, Aman dan Sejahtera), Maka Pemerintah Pelalawan Telah Menetapkan 7 (tujuh), Misi Yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya Melayu;
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan;
3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Untuk Mendukung Perekonomian Daerah Yang Kuat Berdaya Saing Tinggi;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Otonomi Desa;
6. Meningkatkan Investasi Dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berkelanjutan;
7. Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan;

Penjelasan masing-masing Misi di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut aspek pendidikan, kemampuan dan ketrampilan hidup, serta kualitas keimanan

dan ketaqwaan mutlak dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga Kabupaten Pelalawan dapat memiliki pondasi kokoh, yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai budaya, serta memiliki iman dan taqwa.

2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.

Kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah sangat mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh yang sehat, maka akan sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Kabupaten Pelalawan melakukan pembangunan di segala bidang. Mengingat arti penting kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kualitas lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya lingkungan alam sekitar. Salah satu bencana lingkungan yang sering sekali menimpa Kabupaten Pelalawan adalah bahaya kebakaran hutan. Untuk itu diperlukan upaya maksimal dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Selain itu, kesehatan masyarakat harus pula ditopang dengan penyediaan air bersih yang layak, penanganan kawasan kumuh dan akses terhadap sanitasi lingkungan.

3. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Untuk Mendukung Perekonomian Daerah Yang Kuat Berdaya Saing Tinggi.

Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Pelalawan tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara biasa atau business as usual. Hal ini memerlukan langkah-langkah terobosan yang berbasiskan pengetahuan untuk menghasilkan inovasi (pembaruan) diberbagai bidang, difungsikan serta meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Penguatan sistem inovasi merupakan suatu pendekatan pembangunan Kabupaten Pelalawan berbasis pengetahuan, sebagai langkah terobosan yang dilakukan secara sistemis-sitematis, menyeluruh (holistik), serta mengedepankan kerjasama (kalaborasi) antar elemen pembangunan. Penguatan sistem inovasi Kabupaten Pelalawan difokuskan untuk menghasilkan dampak strategis sebagai berikut: (1) berkembangnya ekosistem yang kondusif bagi kreatifitas-keinovasian di daerah; (2) meningkatnya nilai tambah (Produktivitas) dari potensi khas industri unggulan daerah; (3) berkembangnya kapasitas inovatif daerah dan sentra pertumbuhan baru daerah; (4) berkembangnya bisnis-bisnis inovatif di daerah; (5) meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan daya dukung pembangunan Pelalawan yang berkelanjutan.

Sebagai pedoman umum bagi arah kebijakan, digunakan kerangka kebijakan inovasi atau kerangka heksagon, yakni : (1) memperbaiki iklim/lingkungan bagi berkembangnya inovasi dan bisnis; (2) meningkatkan daya dukung penyediaan teknologi/inovasi dan kemampuan pengguna teknologi/inovasi; (3) memperbaiki keterkaitan/interaksi, jaringan dan pelayanan yang berbasis pengetahuan/teknologi; (4) meningkatkan budaya kreatif-inovatif; (5) meningkatkan keterpaduan/koherensi dalam penguatan sistem inovasi; dan (6) meningkatkan penyelarasan sejalan dengan dinamika perkembangan global.

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efektif dan efisien mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan.

Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktifitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu lokasi/ daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di wilayah tersebut.

5. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional, bersih, memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta didukung teknologi informasi dan komunikasi yang handal. Hal ini diharapkan dapat menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, melalui dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Otonomi desa mendorong terwujudnya desa mandiri yang mampu memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kemandirian, kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat desa. Melalui otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat semakin dekat ke tingkat yg paling bawah yaitu desa. Misi mewujudkan desa mandiri dan sejahtera di Kabupaten Pelalawan bukanlah sekedar mimpi belaka, tetapi yakin bisa dicapai dengan langkah dan terobosan baru, niat tulus ikhlas, serta usaha optimal dari seluruh elemen masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.

6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumberdaya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan.

Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi untuk membangun kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa kekayaan alam di sektor gas alam, batubara, bentonit, kaolin, pasir kuarsa pariwisata dan perkebunan merupakan potensi unggulan. Beberapa di antaranya adalah gas alam di Kecamatan Langgam, fenomena alam gelombang Bono di Kecamatan Teluk Meranti, dan karet serta kelapa sawit yang berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. Potensi daerah tersebut dapat menjadi modal daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Dari beberapa potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi pariwisata yang sangat eksotis untuk dikembangkan menjadi potensi unggulan daerah sebagai tujuan pariwisata nasional di dunia, antara lain gelombang pasang “Bono” dan Taman Nasional

tesso Nilo. Gelombang bono sejak ratusan tahun silam menurut legenda merupakan perwujudan tujuh hantu yang dikerapkali membolak-balik kapal dan memakan korban. Namun bagi peselancar dunia gelombang yang terjadi karena pasang surut tersebut justru jadi surga peselancar. Jika dilaut mereka hanya bisa beselancar 30 detik dalam satu gelombang, diatas Bono mereka bisa menikmati 30-60 menit. Gelombang Bono yang berkategori tidal robe, merupakan salah satu objek wisata berselancar terbaik di dunia. Destinasi wisata tersebut, apabila dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber penggerak pembangunan ekonomi masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Pengelolaan kekayaan dalam unggulan dibarengi dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif termasuk kepastian hukum dan berusaha di wilayah Pelalawan. Komitmen tersebut menuntut adanya penerapan good governance dan pelayanan prima dari pemerintah daerah. Tanpa manajemen pemerintahan yang baik dan bersih, maka akan sulit untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang benar-benar mampu memberi kesejahteraan bagi rakyat.

Potensi pangan daerah yang cukup besar perlu dikelola dengan optimal dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional, serta peningkatan pendapatan dan nilai tukar petani tanaman pangan, peternak, pekebun, nelayan dan petani ikan. Potensi ekonomi lainnya terus didorong dalam rangka memberantas kemiskinan.

7. Menciptakan ketertiban dan keamanan

Penduduk Kabupaten pelalawan terdiri dari multi etnis, hampir seluruh suku ada di wilayah ini. Dengan kemajemukan ini, masyarakat Kabupaten Pelalawan terus melestarikan nilai-nilai hidup bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati.

Penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan agar tercipta rasa aman di masyarakat dalam menjalankan seluruh aktifitasnya. Kondisi lingkungan yang aman, tertip dan nyaman tidak saja berdampak positif bagi masyarakat yang hidup di wilayah ini, namun juga sangat baik bagi pencitraan daerah. Kondisi

wilayah yang aman, tentram dan tertib menjadi salah satu daya tarik investasi yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

2. PERJANJIAN KINERJA 2020

Dalam tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber dana yang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Keseluruhan indicator sasaran yang ingin dicapai tersebar pada program dari berbagai Kegiatan yang ada di Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengalokasikan Anggaran Belanjanya yakni pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dengan alokasi sebesar Rp 1.835.781.365.551,14

Perjanjian Kinerja yang dicapai untuk Tahun 2020 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas Pendidikan (PELALAWAN CERDAS)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,22
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49
2	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,96
3	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	Indeks Pembangunan Budaya (Indeks)	0,81
4	Meningkatnya jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PELALAWAN SEHAT)	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	71,61
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	66,00
		Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	0

6	Meningkatnya Ekosistim dan Budaya Inovasi, Daya Dukung Penyediaan dan Pemanfaatan Tekonologi/Inovasi dan	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	7,24
		Peringkat Pengelolaan Smart City	18
	Global (PELALAWAN INOVATIF)		
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan (PELALAWAN LANCAR)	Indeks Akseibilitas Jalan	0,05
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas	165
		Rata-rata waktu tempuh dari ibu kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten	1,63
8	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (PELALAWAN TERANG)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	87,00
		Rasio Desa Teraliri Listrik (%)	90,00
9	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan (%)	41,25
		Jumlah Kunjungan ke kawasan Wisata (orang)	96,666
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, Transfaran dan akuntabel serta kinerja yang optimum	Opini AUDIT BPK, (Opini)	WTP
		NilaiSAKIP (nilai)	B
		Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai)	ST
		Persentase Indikator SPM Daerah yang tercapai (%)	87,50
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,22
11	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri	Jumlah Desa dengan kategori Mandiri (desa)	4
12	MeningkatnyaKemandirian Ekonomi dan terkendalinya kesenjangan Pendapatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5
		Indeks Gini (Indeks)	0,32
13	Meningkatnya Insvestasi Daerah	NilaiInvestasi (Triliun Rupiah)	107
14	MeningkatnyaKetahanan Pangan Daerah dan	SkorPolaPanganHarapan (%)	91,74

	Pendapatan Masyarakat (PELALAWAN MAKMUR)	PengeluaranPerkapitaPenduduk (RpJuta/Tahun)	11,900,89
15	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah (PELALAWAN EKSOTIS)	Kontribusi PDRB Pariwisata (Miliyar Rupiah)	103,16
16	Menurunnya Tingkat Kriminalitas	AngkaKriminilitasPengeluaran (Angka)	260
17	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang aman dan Harmonis	Jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan	0,19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yg ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Daerah diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1. Capaian Kinerja Utama Pemerintah Daerah

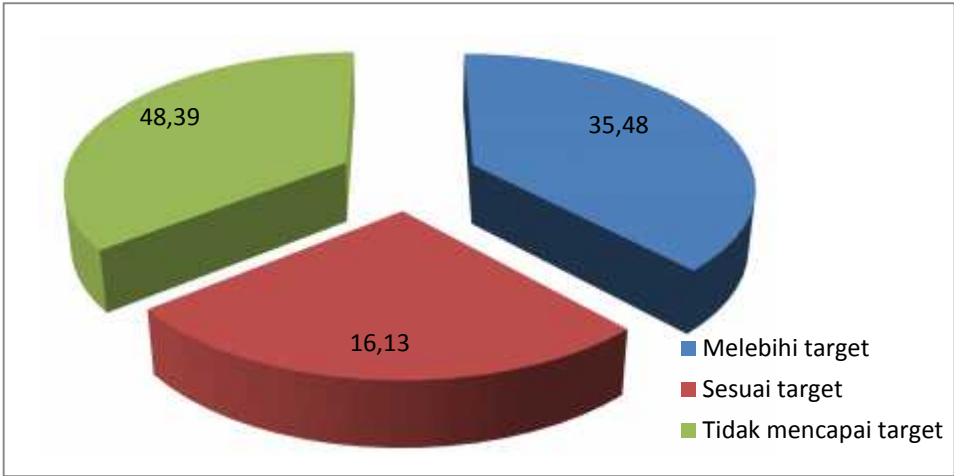
Umumnya Ukuran keberhasilan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang terdapat dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pelalawan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 adalah terletak pada tercapainya Sasaran Strategis Daerah yaitu Pelalawan Cerdas, Pelalawan Sehat, Pelalawan Terang, Pelalawan Lancar, Pelalawan Makmur, Pelalawan Eksotis dan Pelalawan Inovatif. Capaian sasaran strategis daerah (IKU Daerah) tahun 2020 merupakan tahun pertama atas pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021, sebagaimana tertera pada tabel. 3.1. dibawah ini.

Tabel. 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran Stretegis Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis Daerah	Jumlah Indikator	% Capaian
1	Melebihi target	11	35,48
2	Sesuai target	5	16,13
3	Tidak mencapai target	15	48,39

Diagram 3.1.

Persentase Capaian Kinerja Sasaran Daerah Tahun 2020



Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, secara rinci diuraikan pada tabel 3.2. & 3.3. beserta penjelasannya dibawah ini.

Tabel. 3.2.

Capaian Sasaran Strategis Daerah tahun 2020

NO	Sasaran Strategis Daerah	Indikator (satuan)	Kondisi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan PELALAWAN CERDAS	Rata-Rata Lama Sekolah, (Tahun)	8,48	8,22	8,20	99,76
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,17	12,49	12,07	96,64
2	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat PELALAWAN SEHAT	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	71,17	71,61	71,90	100,41
3	Meningkatnya Ekosistim dan Budaya Inovasi, Daya Dukung Penyediaan dan Pemanfaatan Teknologi/Inovasi dan Keselarasan Perkembangan Global PELALAWAN INOVATIF	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	6,5	7,24	6,50	89,78
		Peringkat Pengelolaan Smart City	16	18	24	75,00
4	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan PELALAWAN LANCAR	Indeks Aksesibilitas Jalan (Indeks)	0,05	0,05	0,11	220,00
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Angka)	156	165	142	116,20
		Rata-rata waktu Tempuh dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten	1,75	1.63	1,58	96,94

NO	Sasaran Strategis Daerah	Indikator (satuan)	Kondisi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
5	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan PELALAWAN TERANG	Rasio Elektrifikasi RumahTangga, (%)	84,16	84,00	94,37	112,35
		Rasio Desa Teraliri Listrik (%)	70,94	90,00	95,15	106,84
6	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah PELALAWAN EKSOTIS	Jumlah Kunjungan ke Kawasan WIsata (orang)	226,034	96.666	215,241	222,67
		Kontribusi PDRB Pariwisata (Milyar Rupiah)	88,65	103,16	92,30	89,48
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Pendapatan Masyarakat PELALAWAN MAKMUR	Pengeluaran Perkapita Penduduk (Rp.Juta/Tahun)	12,149,00	11,900,89	11,606,00	97,45
		Skor Pola Pangan Harapan	84,10	91,74	73,55	80.18

Tabel. 3.3.

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Daerah tahun 2020

NO	Sasaran Strategis Daerah	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian Kinerja Sasaran Strategis
1	Terwujudnya PELALAWAN CERDAS	2	98,20
2	Terwujudnya PELALAWAN SEHAT	1	100,41
3	Terwujudnya PELALAWAN INOVATIF	2	82,38
4	Terwujudnya PELALAWAN LANCAR	3	137,71
5	Terwujudnya PELALAWAN TERANG	2	107,65
6	Terwujudnya PELALAWAN EKSOTIS	2	152,23
7	Terwujudnya PELALAWAN MAKMUR	2	89,62
	Jumlah/Rata-rata Capaian Strategis Daerah	14	109,79

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Utama Daerah

Analisa dan evaluasi kinerja memberikan justifikasi dan penyelesaian tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang ditargetkan. Secara umum Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 dengan Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2020 sebanyak 16 (enam belas) sasaran-sasaran strategis dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja. Capaian kinerja tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pelalawan. Capaian kinerja utama Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD adalah sebagaimana tertera dibawah ini:

Tabel. 3.4.
Capaian Perjanjian Kinerja Daerah tahun 2020

NO	Sasaran	Indikator (satuan)	Kondisi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
1	Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah, (Tahun)	8,48	8,22	8,20	99,76
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,17	12,49	12,07	96,64
2	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,51	68,96	68,21	98,91
3	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	Indeks Pembangunan Budaya (Poin)	0,81	0,81	57,47	7.095
4	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	71,17	71,61	71,90	100,41
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (Indeks)	40,00	66,00	63,54	96,28
		Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	38	0	48	48,00
6	Meningkatnya Ekosistem dan Budaya Inovasi, Daya dukung penyediaan dan Pemanfaatan teknologi/Inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	6,50	7,24	6,50	89,78
		Peringkat Pengelolaan Smart City	16	18	24	75,00

NO	Sasaran	Indikator (satuan)	Kondisi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian 2020
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks Akseibilitas Jalan	0,05	0,05	0,11	220,00
		Angka Kecelakaan Lalu Lintas	156	165	142	116,20
		Rata-rata waktu tempuh dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota kabupaten	1,75	1,63	1,58	96,94
8	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrk Pedesaan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	84,16	84,00	94,37	112,35
		Rasio Desa Teraliri Listrik (%)	70,94	90,00	96,15	106,84
9	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalwan (%)	33,12	41,25	41,25	100,00
		Jumlah Kunjungan ke Kawasan Wisata (orang)	226,034	96,666	215,241	222,67
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	Opini Audit BPK (Opini)	WTP	WTP	WTP	100,00
		Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	100,00
		Nilai Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai)	T	ST	T	T
		Persentase Indikator SPM Daerah yang tercapai (%)	68,70	87,50	69,64	79,59
		Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,27	84,22	80,18	95,21
11	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri	Jumlah Desa dengan Kategori Mandiri (Desa)	4	4	16	400,00
12	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,75	4,50	2,24	49,78
		Indeks Gini (indeks)	0,334	0,320	0,329	102,82
13	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi, (triliyun rupiah)	242,03	107,00	254,89	238,22
14	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Pendapatan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (%)	84,10	91,74	73,55	80.18
		Pengeluaran Perakpita Penduduk	12,149,00	11,909,89	11,606,00	97,45
15	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (milyar rupiah)	88,65	103,16	92,30	89,48
16	Menurunnya Tingkat Kriminalitas	Angka Kriminalitas (angka)	261	260	381	146,54
17	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman dan Harmonis	Jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan	0	0,19	0	100,00

Tabel. 3.5.
Rata-rata Capaian Perjanjian Kinerja Daerah tahun 2020

NO	Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata % Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksebilitas Pendidikan	2	97,19
2	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	1	98,91
3	Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu	1	7.095
4	Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1	100,40
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan	2	72,13
6	Meningkatnya Ekosistem dan Budaya Inovasi, Daya dukung penyediaan dan Pemanfaatan teknologi/Inovasi, jaringan inovasi dan keselarasan perkembangan global	2	82,38
7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan	3	137,71
8	Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrk Pedesaan	2	107,65
9	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah	2	157.50
10	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, transparan dan akuntabel serta kinerja pelayanan yang optimum	6	93,69
11	Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri	1	400,00
12	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan terkendalinya kesenjangan pendapatan	2	94,85
13	Meningkatnya Investasi Daerah	1	238,21
14	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Pendapatan masyarakat	2	89,62
15	Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah	1	89,47
16	Menurunnya Tingkat Kriminalitas	1	146,53
17	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman dan Harmonis	1	100,00
Jumlah/Rata-rata Capaian Kinerja		31	128,63

Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja utama pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, secara rinci dapat dilihat pada analisis dibawah ini :

1. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kuallitas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Rata-Rata Lama Sekolah,(Tahun)	8,49	8,22	8,20	99,76
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,17	12,49	12,07	96,64

Pelalawan Cerdas merupakan upaya memperkuat pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan untuk semua, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas Guru dan peningkatan proses belajar mengajar. Ukuran Keberhasilan sasaran Pelalawan Cerdas akan ditentukan pada pencapaian Indikator Kinerjanya yaitu meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan Lama Sekolah (HSL) adalah Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Adapun kegunaan dari Indikator Kinerja ini adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya

angka Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang.

Semakin tinggi angka capaian Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Realisasi angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 8,20 tahun atau dengan capaian sebesar 99,76 persen dari target yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 92,78 tahun, artinya mengalami penurunan sebesar 0,28 persen

Untuk menghitung capaian kinerja terhadap angka harapan lama sekolah tahun 2020 diperoleh sebesar 12,07 tahun, artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,07 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester II). Persentase capaian kinerja sebesar 96,64 persen dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan jika dibandingkan terhadap capaian kinerja tahun 2019 terealisasi sebesar 12,17 artinya mengalami penurunan sebesar 0,10 persen. Adapun program untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, program peningkatan guru dan tenaga kependidikan, program pendidikan anak usia dini (paud), program manajemen sekolah dan program pendidikan untuk semua.

2. Analisis Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN KINERJA 2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)	69,51	68,96	68,21	98,91

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas. TPAK sama dengan Jumlah

Angkatan Kerja dibagi dengan Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas dikalikan 100. Semakin Tinggi Tingkat TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan bahwa kebutuhan akan pekerjaan yang tinggi, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah serta meningkatnya jumlah tanggungan keluarga, sehingga penduduk usia kerja lebih memilih dunia kerja dibanding bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik, sebesar 68,21 atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,91 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 68,96 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan adalah jumlah Angkatan Kerja tercatat sebanyak 237,236 orang pada tahun 2020 dan penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) sebanyak 347,866 orang, sehingga dengan membandingkan kedua besaran diatas dapat diperoleh angka Tingkat Partisipasi Keraj (TPAK) tahun 2020 sebesar 68,21 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 realisasi capaian kinerja TPAK sebesar 69,17 atau sebesar 103,62 persen, artinya mengalami penurunan sebesar 0,96 persen.

Program yang mendukung atas keberhasilan capaian kinerja TPAK yakni Program Peningkatan Kuantitas Tenaga Kerja dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Adapun salah satu upaya untuk menekan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang terlalu tinggi adalah dengan mengembalikan usia sekolah ke bangku pendidikan sehingga saat menamatkan pendidikan telah memiliki keahlian baik secara akademis maupun ketrampilan tambahan lainnya yang dapat meningkatkan daya saing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, layak sesuai dengan permintaan pasar kerja. Sebagai kendala dan hambatan dalam pencapaian Indikator TPAK adalah Pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan jumlah angka Pengangguran Terbuka terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja karena penyedia lapangan kerja membatasi dan mengurangi aktifitas usaha mereka, Namun disisi lain kelompok penduduk yang tergolong usia kerja tidak juga melakukan aktifitas yg aktif secara ekonomi, hal ini terlihat dari meningkatnya penduduk usia kerja yang termasuk kategori bukan angkatan kerja.

3. Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya Melayu

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET TAHUN 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Indeks Pembangunan Budaya (poin)	0,81	0,81	57,47	7.095

Dalam adat budaya Melayu dikenal sebuah ungkapan “Adat bersendi syara’ syara’ bersendi Kitabullah”. Ungkapan ini dapat dimaknai setiap aktifitas hidup masyarakat Melayu Kabupaten Pelalawan harus berdasarkan atas tuntutan dan syariat agama Islam.

Indeks Pembangunan Kebudayaan mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNISCO Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah, Terdapat 31 indikator penyusunan indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran, diantaranya Ekonomi Budaya, Pendidikan ,Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Indeks Pembangunan Budaya tidak Mengukur Nilai Budaya disuatu daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik nilai indeks Pembangunan Budaya untuk Kabupaten Pelalawan yakni sebesar 57,47 persen jika dibandingkan dengan indeks Pembangunan Budaya secara Nasional adalah sebesar 53,74. Artinya indeks Pembangunan Budaya Kabupaten Pelalawan jauh lebih besar atau selesih 3,73 persen .

Masyarakat Kabupaten Pelalawan merupakan bagian masyarakat melayu yang menjunjung tinggi nilai nilai budaya melayu. Seperti kita ketahui, bahwa budaya melayu identik dengan nilai masyarakat relegius, sehingga untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa diperlukan terobosan program program yang mendukung agar tercapainya sasaran tersebut. Sasaran keberhasilan Meningkatkan Pemahaman dan Penerapan Nilai Budaya melayu salah satu indikator Kinerja Indeks Pembangunan Budaya.

Budaya melayu identik dengan masyarakat yang religius, sehingga untuk mencapai Terwujudnya Kehidupan Sosial Kemasyarakatan yang Berbudaya Melayu, Beriman, dan Bertaqwa, makaperlu upaya untuk mencapai atah

tersebut melalui kegiatan Magrib Mengaji sebagaimana yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Magrib Mengaji.

4. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Jangkauan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks)	71.17	71,61	71,90	100,41

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah indikator kunci untuk melihat pembangunan kesehatan sampai tingkat kabupaten/kota. Penyusunan IPKM 2020 mengacu kepada model IPKM 2013 yang dijabarkan dalam tujuh subindeks yaitu :

1. Kesehatan Balita,
2. Kesehatan Reproduksi,
3. Pelayanan Kesehatan,
4. Perilaku Kesehatan,
5. Penyakit Tidak Menular,
6. Penyakit Menular, dan
7. Kesehatan Lingkungan.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Pelalawan membaik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal tersebut merupakan hasil dari penghitungan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2019 yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan untuk advokasi ke semua sektor, menentukan prioritas daerah yang harus dibantu, dan masalah spesifik daerah yang perlu diprioritaskan penanganannya. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2020 menunjukkan pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Pelalawan mengalami perbaikan dari IPKM 2019. Perubahan capaian IPKM 2020 salah satunya terlihat pada Peningkatan nilai IPKM 2020 menjadi 71,90 dari yang sebelumnya 71,17 meningkat jadi 0,73.

Peningkatan angka itu menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Pelalawan meningkat dalam 2 tahun ini. Sebagai contoh, berdasarkan hasil IPKM 2020, peningkatan tersebut dapat dilihat pada

Persentase Balita Gizi Buruk (%) yang mengalami penurunan menjadi 0,02% dari total Balita yang ada di Kabupaten Pelalawan. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak menular penderita Hipertensi 34,72%.

Adapun Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja ini adalah:

- a. Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular :
 1. Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 2. Penanggulangan HIV/AIDS.
- b. Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu & Anak Serta Kesehatan Lingkungan :
 1. Pembinaan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
 2. Pembinaan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
 3. Penanggulangan Gizi Buruk.
 4. Pelacakan Kasus Kematian Ibu Dan Bayi
- c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar :
 - Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.

Mengenai Kendala dan Hambatan terhadap Indikator Kinerja ini adalah Masalah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Hal ini terlihat dari pencapaian 12 Indikator SPM yang mengalami penurunan. Target sasaran pelayanan dasar tidak bisa terpenuhi 100%, tidak bisa melakukan pelayanan langsung kemasyarakat dalam bentuk promosi Kesehatan.

7 (tujuh) indikator penyusunan IPKM mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah. Masih adanya kesenjangan antar wilayah menunjukkan masih perlunya terobosan program untuk meningkatkan capaian sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan komponen dan IPKM antar Kabupaten, ditemukan bahwa penyakit tidak menular konsisten masih menjadi masalah di hampir semua Kabupaten, serta disparitas antar Kabupaten di dalam Provinsi Riau. IPKM 2020 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan selama satu tahun, di tingkat Kabupaten Pelalawan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan bermanfaat untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan yang sesuai dengan besaran masalah di kabupaten Pelalawan.

5. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	40	66,00	63,54	96,28
Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	38	0	48	48,00

Ukuran Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan adalah terletak pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) dan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada Tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sebesar adalah sebesar 63,54 atau terealisasi sebesar 96,28 persen. Adapun Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pemeliharaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program tata Lingkungan, Program Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta Program Penataan Hukum Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh Yale University. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari semua pemangku kepentingan. Penyempurnaan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sudah mengalami perbaikan sebanyak 4 (empat) kali.) Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2020 dengan Indeks/Nilai 63,54 berada dalam kategori CUKUP BAIK. Kecamatan yang menyumbang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tertinggi adalah Teluk Meranti, yakni 73,09, sedangkan yang mempunyai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terendah adalah Pangkalan Lesung, yakni 47,05. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pelalawan tersebut

merupakan angka indikatif dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki. Masih perlu perbaikan dalam pengumpulan data sesuai standar untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Indeks atau indikator merupakan sarana yang digunakan untuk mereduksi banyaknya data dan informasi sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana namun esensinya tetap dapat dipertahankan. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. IKLH ini dapat menjadi acuan dalam proses pengambilan kebijakan karena menjadi salah satu indikator pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan IKA, IKU, dan IKTL di atas, maka dapat dilakukan perhitungan IKLH Kabupaten Pelalawan dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini :

NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KECAMATAN	IKA	IKU	IKTL	IKLH	KATEGORI
1	Bandar Sei Kijang	87,12	37,97	35,17	51,60	Kurang Baik
2	Langgam	85,29	37,16	51,33	57,27	Kurang Baik
3	Pelalawan	80,71	35,19	82,18	67,64	Cukup Baik
4	Pangkalan Kerinci	85,22	43,99	37,74	53,86	Kurang Baik
5	Pangkalan Kuras	83,51	37,85	38,50	51,81	Kurang Baik
6	Bandar Petalangan	85,31	40,17	36,11	52,09	Kurang Baik
7	Pangkalan Lesung	85,33	36,93	25,94	47,05	Sangat Kurang Baik
8	Kerumutan	79,43	39,94	65,26	61,91	Cukup Baik
9	Ukui	85,95	38,55	60,52	61,56	Cukup Baik
10	Bunut	83,52	39,13	65,92	63,16	Cukup Baik
11	Teluk Meranti	79,26	40,63	92,81	73,09	Baik
12	Kuala Kampar	76,52	41,21	54,15	56,98	Kurang Baik
Kabupaten Pelalawan		83,10	39,06	67,22	63,54	Cukup Baik

Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 berjumlah 48 Kejadian. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah kejadian kebakaran hutan lahan adalah berjumlah sebesar 38 kejadian . hal ini mengalami peningkatan sebesar 10 kejadian. Hutan dan Lahan menjadi salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia, baik sebagai sumber penyeimbang ekosistem hingga sebagai sumber ekonomi bagi banyak warga Negara Indonesia. Komoditi tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik oleh korporasi maupun oleh pihak perseorangan. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan oleh

dampak dan kebakaran hutan yang sudah menjalar ke negara-negara tetangga.

Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan atasi Kebakaran hutan dan lahan adalah ;

1. Melakukan Pemetaan lokasi rawan kebakaran
2. Menginventarisasi izin perusahaan perkebunan yang ada
3. Keterlibatan Perusahaan dalam pengawasan Lahan.
4. Pemberdayaan masyarakat tempatan dan menggalakan gerakan menanam tanaman yang ramah terhadap lahan gambut
5. Mensosialisasikan bahaya membuka lahan dengan cara membakar
6. Menghimbau kepada semua elemen masyarakat, perusahaan (pihak-pihak korporasi) untuk tidak membuka lahan dan tidak agar tidak mengulangi perbuatan membakar lahan.

Penanganan Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menjadi salah satu tugas pokok BPBD yang harus ditangani setiap tahunnya, dengan banyaknya kejadian karhutla yang timbul, memang tidak dapat menyesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan banyak faktor penyebabnya dan salah satu adalah kondisi cuaca yang kering dan cukup ekstrim sebagai pemicu munculnya kebakaran hutan dan lahan, dari sisi realisasi capaian kinerja memang tidak dapat dikatakan memenuhi target yaitu 0 (nol) kejadian, namun dari sisi penanganan BPBD melaksanakan tugas dan fungsinya 100 % (seratus persen) dalam arti setiap timbulnya kejadian karhutla, BPBD selalu melaksanakan tugasnya dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut sehingga dalam realisasinya bukan menghitung jumlah kejadian yang timbul saja tetapi penanganan terhadap semua kejadian karhutla yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Pelalawan.

Program atau Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan indikator kinerja tersebut diatas adalah :

1. Kegiatan Penanganan dan penanggulangan bencana (kegiatan ini salah satunya adalah kegiatan penanganan bencana yang didalamnya termasuk bencana kebakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai salah satu kategori bencana selain bencana alam dan non alam lainnya)

2. Kegiatan Posko penanggulangan darurat (kegiatan ini salah satu kegiatan pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan, kegiatan ini berisi aktivasi posko sebagai salah satu sarana komunikasi dengan opd terkait dalam penanganan karhutla dan sebagai sarana informasi dengan media dalam hal informasi data dan informasi berita.
3. Kegiatan Pemadaman langsung kebakaran hutan dan lahan (kegiatan ini dibiayai oleh dana yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup yang tujuannya untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang muncul di kabupaten Pelalawan) kegiatan ini sepenuhnya berisikan kegiatan pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang timbul, seluruh anggaran yang tersedia digunakan untuk pemadaman kebakaran yang terjadi.

Sebagai dampak secara universal dari kondisi yang terjadi pasca kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

1. Terganggunya aktifitas perekonomian dan pembangunan
2. Permasalahan Kabut Asap yang mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran bahkan bisa mengganggu transportasi darat.
3. Penyebaran penyakit ISPA bagi masyarakat
4. Punahnya hayati, flora dan fauna.
5. Dapat mengganggu aktivitas Pendidikan
6. Terganggu Pertanian kerana cahaya matahari yang tertutup oleh kabut.

Kendala yang muncul dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan adalah dengan jarak wilayah ada di Kabupaten Pelalawan ini sangat berjauhan sehingga dengan keterbatasan jumlah Personil dan Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga menjadi salah satu kendala dan hambatan yang tetap diupayakan untuk terus ditingkatkan, keterampilan personil dalam tugasnya juga terus diupayakan untuk ditingkatkan namun dengan keterbatasan anggaran BPBD dalam melengkapi sarana dan prasarana serta peningkatan SDM personil sedikit menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

6. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Ekosistem dan Budaya Inovasi, daya dukung Penyediaan & Pemanfaatan Teknologi/Inovasi dan Keselarasan Perkembangan Global

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN KINERJA 2020
Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	6,5	7,24	6,50	89,78
Peringkat Pengelolaan Smart City	16	18	24	75,00

Realisasi capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah yang dicapai tahun 2020 adalah 6,50, dengan realisasi capaian sebesar 89,78 persen. Sedangkan Realisasi Tahun 2019 capaian Kinerja Index Inovasi Daerah adalah sebesar 6,5 persen atau dengan realisasi capaian sebesar 108,3 persen.

Program Pelalawan Inovatif merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pendekatan inovatif dengan membangun kawasan ekonomi baru yang mengintegrasikan industri bernilai tambah tinggi dengan pusat riset dan perguruan tinggi yang disebut Kawasan Teknopolitan Pelalawan sebagai simpul dari Jaringan Inovasi Pelalawan, Riau dan Sumatra. Ukuran keberhasilan dari sasaran Pelalawan Inovatif terletak pada pencapaian indikator meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dan meningkatnya Peringkat Pengelolaan Smart City

Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2020. Menerangkan bahwa Kabupaten Pelalawan mendapatkan urutan ke 94 (sembilan puluh empat) se-Indonesia. dengan skor Indeks sebesar 1,750 atau dengan kategori Sangat Inovatif, dan pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah juga mendapatkan Kategori Sangat Inovatfi dengan Indeks 6930, atau realisasi sebesar 108,3 persen.

Dalam mengukur kemampuan daerah dalam pengembangan inovasi daerah, digunakan Radar Inovasi Daerah (RIDa) untuk mengukur tingkat implementasi pengatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah). Menggunakan Pendekatan lima pilar dengan enam Kerangka Kebijakan Inovasi.

1. Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah terdiri dari 17 elemen dan 24 indikator yang tersebar dalam 6 KKI.

2. Pilar Penguatan Kluster Industri terdiri dari 14 elemen dan 20 indikator yang tersebar dalam 6 KKI.
3. Pilar Penguatan Jaringan Inovasi terdiri dari 12 elemen dan 12 indikator yang tersebar dalam 6 KKI.
4. Pilar Penguatan Teknopeneur terdiri dari 14 elemen dan 14 indikator yang tersebar dalam 6 KKI.
5. Pilar Penguatan Tematik Daerah terdiri dari 16 elemen dan 18 indikator yang tersebar dalam 6 KKI.

Sebagai elemen pengukur RIDa, setiap KKI didefinisikan Kembali kedalam elemen dan indikator. Setiap KKI memiliki elemen dan indikator dengan jumlah yang berbeda. secara total jumlah elemen Rida adalah 55 dan Indikator sebanyak 90. fokus pertanyaan untuk setiap KKI pada setiap program juga berbeda. secara detail komponen penyusun RIDa dijelaskan sebagai berikut :

(1) Program Penguatan ekosistem inovasi

Program ini terdiri dari 12 elemen dan 26 Indikator. Sebagai program input dalam pelaksanaan konsep system inovasi daerah, fokus progam adalah pada penciptaan ekosistem yang kondusif untuk berinovasi melalui pengembangan regulasi dan budaya. Terlihat pada tabel 1 fokus pertanyaan dari indikator juga mencerminkan butir-butir 'input' yang mampu mempelancar pelaksanaan program dalam pembangunan ekosistem inovasi seperti regulasi sistem inovasi daerah dan Pendidikan kewirausahaan, SDM berkualitas, penerapan standar internasional dalam pelaksanaan kegiatan daerah.

JUMLAH DAN FOKUS PERTANYAAN PADA PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM DAERAH

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen	Indikator	Fokus pertanyaan
KKI 1	4	9	Infrastruktur dasar pendukung inovasi (Perberkmeristek & kemendagri 03/36 Tahun 2012) dan kemudahan investasi
KKI 2	2	8	input SDM dan kualitas lembaga Iptekin
KKI 3	1	1	Jumlah kerjasama daerah (G to G) dalam pengembangan inovasi.
KKI 4	2	4	Muatan wirausaha dan apresiasi inovasi
KKI 5	1	1	Kesesuaian pelaksanaan SIDA dengan Perber 03/362012
KKI 6	2	3	Keberlanjutan ekologi, energi, gender, regulasi, upah minimum
Total	12	26	

(2) Program Penguatan Klaster Industri

Program ini terdiri dari 11 elemen dan 14 Indikator. Fokus program adalah pada pengembangan dan penguatan potensi unggulan daerah. Sebagai program yang berfungsi dalam ‘proses’ pengembangan inovasi 16 indikator memiliki fokus pertanyaan pada regulasi pengembangan produk unggulan, Kerjasama antara aktor dalam pengembangan industry dan jumlah pertumbuhan klaster di suatu wilayah.

JUMLAH DAN FOKUS PERTANYAAN PADA PROGRAM PENGUATAN KLASTER INDUSTRY

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen	Indikator	Fokus pertanyaan
KKI 1	3	4	Regulasi pengembangan produk unggulan daerah (Kemendagri No.9 tahun 2014)
KKI 2	2	3	Jumlah lembaga (univeristas dan komunitas/asosiasi bisnis yang terlibat
KKI 3	2	2	jumlah dan skala Kerjasama pengelola klaster dengan universitas/litbangyasa
KKI 4	2	3	Jumlah klister industry, pembinaan klaster
KKI 5	1	1	Kesesuaian dengan program pembangunan industry sesuai dengan provinsi/tingkat yang lebih tinggi (perpemperin No.110 tahun 2015)
KKI 6	1	1	Program lingkungan bagi kllaster
Total	11	14	

(3). Program Pengembangan jejaring inovasi

Program 3 Pengembangan jaringan inovasi terdiri dari 13 elemen dan 19 Indikator. Fokus program adalah (1) Membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor inovasi (2) mengalirkan pengetahuan dan pembelajaran dari penghasil inovasi kepada pengguna inovasi. untuk memperlancar tujuan tersebut diperlukan wahana/inftasrtuktur khusus. Oleh karena itu dalam penilaian program, fokus penilaian adalah pada keberadaan wahana intermediasi didaerah seperti Tehcnopark, Pusat inovasi, atau lembaga intermediasi lainnya yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara pencipta dan pengguna inovasi, baik secara jumlah maupun kualitas. Meski demikian daerah yang telah memiliki Technoaprk berkesempatan memiliki nilai lebih tinggi karena fasilitas tersebut menjadi ‘state of the art’ dalam mendorong pengembangan inovasi di daerah.

JUMLAH DAN FOKUS PERTANYAAN PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN JEJARING INOVASI

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen	Indikator	Fokus pertanyaan
KKI 1	4	9	Regulasi pengembangan wahana jejaring inovasi di daerah
KKI 2	3	4	Jumlah lembaga yang terlibat pada kegiatan ditechopark
KKI 3	2	2	Jumlah dan skala kerjasama technoaprk dengan aktor lain
KI 4	2	2	Jumlah wirausaha baru yang mendata
KKI 5	1	1	pembinaan didalam technopark
KKI 6	1	1	Kesesuaian kebijakan daerah sesuai NSPK nasional perpres 106 tahun 2017
Total	13	19	Standar keikutsertaan dalam forum internasional

(4). Program Penumbuhan Teknopreneur

Program Penumbuhan teknopreneur terdiri dari 10 elemen dan 17 Indikator. Program ini merupakan ‘output’ dari pelaksanaan konsep system inovasi daerah yang berfokus pada penumbuhan jumlah dan kualitas teknopreneur. Oleh karena itu terlihat pada table 4 fokus pertanyaan ada indikaktor adalah seputar keberadaan sarana pendukung tumbuhnya teknopreneur yaitu incubator atau Business Development Service Provider (BDSP) sebagai, kegiatan pelatihan dan Kerjasama kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah, jumlah penambahan teknopreneur serta paten.

JUMLAH DAN FOKUS PERTANYAAN PADA PROGRAM PENUMBUHAN
TEKNOPRENER

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen	Indikator	Fokus pertanyaan
KKI 1	4	7	Inkubator (Permen KUKM No 24 Tahun 2015)
KKI 2	1	2	Lembaga yang berfungsi sebagai pembinaan teknopreneur
KKI 3	1	2	Jumlah dan skala kerjasmaa pemerintah dibidang teknopreneur
KKI 4	1	2	Jumlah teknopreneur
KKI 5	1	2	Adopsi peraturan pengembangan teknopreneur secara berjenjang
KKI 6	2	2	Penciptaan Paten
Total	10	19	

(5). Program Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)

Program Penguatan Infastruktur TIK terdiri dari 9 elemen dan 14 Indikator. Berperan sebagai program 'input' bersama program penguatan ekosistem inovasi, penilaian pengembangan Infastruktur TIK ini berfokus pada keberadaan kegiatan dan Lembaga penunjang dalam penggunaan TIK di sektor pelayanan dan pemerintahan daerah, sebagaimana terlihat pada table dibawah ini :

JUMLAH DAN FOKUS PERTANYAAN PADA PROGRAM
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INOVASI (TIK)

Kerangka Kebijakan Inovasi	Elemen	Indikator	Fokus pertanyaan
KKI 1	3	7	Regulasi pengembangan program TIK
KKI 2	2	3	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengembangan TIK
KKI 3	1	1	Jumlah dan skala kolaborasi dalam TIK
KKI 4	1	1	Pelatihan berbasis TIK
KKI 5	1	1	Koherensi kebijakan dengan Kerjasama pusat dan daerah
KKI 6	1	1	Penggunaan produk sesuai standar internasional
Total	9	14	

Adapun Program Kegiatan yang mendukung adalah Penguatan Inovasi Daerah yakni Kegiatan Peningkatan Desa Inovasi dan Kegiatan Peningkatan Inovasi Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan Program ini ada beberapa hal yang menjadi Kendala yakni Kurang memahami pentingnya inovasi dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah serta Belum terpublikasi / terdokumentasi dengan baik data – data yang berhubungan dengan inovasi. Salah satu faktor pendukung sebuah negara menjadi lebih inovatif dilakukan dengan program sistem inovasi nasional yang dimana dalam pergerakannya didukung oleh sub dibawahnya yaitu sistem inovasi daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus memanfaatkan potensi sumber daya

yang mempunyai nilai jual tambah dalam membangun perekonomian daerah.

Kerangka kebijakan inovasi ini merupakan kerangka kerja kolaboratif sebagai pijakan bersama (Common Platform) para pihak bagi pengembangan koherensi dan sinergitas kebijakan dan tindakan implementasi operasionalnya. Wahana pelaksanaan enam agenda tersebut dilakukan oleh BPPT sebagai sistematika strategis Penguatan Sistem Inovasi Daerah, yaitu :

1. Kondisi Sistem Inovasi Daerah saat ini
2. Tantangan dan peluang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
3. Kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai.
4. Arah kebijakan dan strategi Penguatan Sistem Inovasi
5. Fokus dan program prioritas Sistem Inovasi Daerah.
6. Rencana aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Dalam perkembangannya untuk memperkuat sistem inovasi nasional (SINas) diperlukan wahana untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreatifitas-keinovasian ditingkat yang lebih bawah atau tingkat daerah, dimana ini disebut sebagai sistem inovasi daerah yang selanjutnya disebut dengan (SIDa) yang merupakan bagian integral dari penguatan sistem inovasi nasional.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Peringkat Lomba Karya Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : KPTS.24/Balitbangda-Intek/2020/570 tanggal 30 September 2020

PERINGKAT LOMBA KARYA INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

NO	PERINGKAT	JUDUL INOVASI	NILAI RATA-RATA	PERINGKAT
1	Sekretariat Daerah	Aplikasi Sibadik (Sistem Informasi Bantuan Pendidikan)	91.98	I
2	Dinas Perhubungan	Aplikasi KIR Pelalawan Berbasis Android	91.43	II
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penuntasan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Saber Ke Petang Jebol	85.13	III
4	Dinas Kesehatan	Selembayung Melayu (Selamatkan Lindungi	81.40	IV

		Masyarakat dari Bahaya Pasung Melalui Pelayanan Terpadu)		
5	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Pengendali dan Pengelolaan Gas Metan menjadi Energo di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di Desa Kemang	80.00	V
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPHTB (Melalui Online)	78.25	VI
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP-Pintar (Pelayanan Perizinan Terpadu)	76.58	VII
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rumah Bumdes Pelalawan	75.58	VIII
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	Lambe Keling (Layanan Metode KB Keliling)	75.35	IX
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Global Warta Inovatif Government	74.50	X
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rumah Pemuda Pelalawan Berbasis Inovatif dan Kreatif (Rupawan Bermotif)	68.73	XI
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Brojika (Brownis Biji Karet)	66.67	XII

Realisasi capaian kinerja Peringkat Pengelolaan Smart City Tahun 2020 yakni Peringkat 24 dengan realisasi capaian sebesar yakni 66,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar yakni 18. Sesuai dengan surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Implementasi Masterplan dan Quick Win Smart City Tahap I tahun 2020 Dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City, jika dibandingkan pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja Peringkat Pengelolaan Smart City mengalami penurunan yakni peringkat 16.

Penilaian Evaluasi terhadap implementasi Program Smart City di 75 (tujuh Puluh Lima) Kota/Kabupaten percontohan (pilot project) yang terpilih melalui Program Menuju 100 Smart City 2017-2018 diukur berdasarkan 5 (lima) dimensi dengan formulasi perhitungan yang berbeda yakni :

1. Baseline (bobot 10%) menggambarkan nilai improvement yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi Masterplan dan Quick Win Smart City Tahun 2020.
2. Output (bobot 20%), mencakup terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program Smart City, untuk menilai sejauh mana pemerintah Kota/Kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan serta anggaran untuk program Smart City.
3. Outcome (30%) ,mencakup pelaksanaan rencana yang ada di Masterplan Smart City, untuk menilai sejauhmana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah.
4. Impact (bobot 30%) ,mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi Program Smart City, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, kerlibatan masyarakat serta keberlanjutan program yang telah berjalan.
5. Program Percepatan atau Quick Win (bobot 10%), mencakup tingkat Inovasi Program percepatan Smart City. Untuk menilai kreativitas dan daya Inovasi pada program percepatan (Quick Win).

Hasil Penilaian dari 5 (lima) dimensi tersebut dikategorikan menjadi 2 (dua), yakni ;

- a. Indeks Pencapaian atau rata-rata Bobot (performance) merupakan tingkat pembangunan Smart City.
- b. Indeks Peningkatan merupakan tingkat perbaikan yang terjadi pada daerah.

Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja Peningkat Pengelolaan Smart City adalah :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Layanan Monitoring, Penataan dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatikan.
 - Wbsite Lembaga Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah
 - Layanan Akses Internet
 - Pengelolaan Smart City
 - Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi umum dan Khusus

7. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN 2020
Indeks Akseibilitas Jalan	0,05	0,05	0,11	220,00
Angka Kecelakaan Lalu Lintas	156	165	142	116.20
Rata-rata waktu tempuh dari ibu kota kecamatan	1,75	1,63	1,58	96,94

Pelalawan Lancar yakni upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan di Kabupaten Pelalawan dengan indikator Kinerja yang jadi pendukung yakni Indeks Akseibilitas Jalan, Angka Kecelakaan lalu lintas dan Rata-rata waktu tempuh dari ibu kota kecamatan

Realisasi Indeks Aksseibilitas Jalan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 sebesar 0,11 atau dengan kategori Baik, Indeks Aksesibilitas Jalan merupakan salah satu parameter dalam menentukan tingkat pelayanan infrastruktur jaringan jalan, Indeks ini disusun berdasarkan panjang jaringan jalan dibagi luas wilayah daerah dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km²). Untuk Kabupaten Pelalawan , dengan jumlah penduduk sebesar 390.046 jiwa (SP2020, BPS Pelalawan 2021) dan Luas wilayah adalah 13.067,29 Km², maka tingkat kepadatan adalah sebesar 29,85 dengan indek adalah > 0,05. Adapun Program yang mendukung indikator kinerja diatas adalah Program Pembangunan Jalan dan jembatan serta Program Pembangunan Infrastruktur dasar kawasan teknopolitan.

Realisasi capaian kinerja Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020 yakni 142 dengan realisasi capaian sebesar yakni 116,20 persen dari target yang ditetapkan sebesar yakni 165.

Hal ini didukung oleh Program Pemerintah Pusat terkait penanggulangan wabag Covid-19 yaitu dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pembatasan akses keluar masuk kendaraan dan juga melakukan pengamanan dibeberapa titik yang telah ditetapkan.

Selanjutnya capaian kinerja Rata-rata waktu tempuh dari ibu kota kecamatan tahun 2020 yakni sebesar 1,58 atau realisasi capaian sebesar 96,94 persen dari target yang ditetapkan yakni sebesar 1,63, dibandingkan dengan tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 1,75.

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja rata-rata waktu tempuh dari ibukota kecamatan adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dan Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pendukung Kelancaran Perhubungan. Adapun yang menjadi hambatan dan kendala terkait Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perhubungan pada tahun 2020 yakni terjadi pengurangan anggaran akibat perubahan kebijakan terhadap penanggulangan Wabah Covid-19, sehingga terdapat beberapa Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja tidak dapat dilaksanakan seperti Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban LLAJSDP.

8. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	84,16	84,00	94,37	112,35
Rasio Desa Teraliri Listrik (%)	70,94	90,00	95,15	106,84

Pelalawan Terang yakni upaya peningkatan elektrifikasi rumah tangga dan pemanfaatan sumberdaya listrik dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial dan budaya dengan memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik dan pembangunan jaringan listrik sampai ke pelosok. Pencapaian sasaran Pelalawan Terang diukur dari keberhasilan indicator Persentase Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Persentase Rasio Desa Teraliri Listrik. Untuk Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga adalah Perbandingan Jumlah Rumah Tangga yang sudah dialiri listrik dengan Jumlah Total Rumah Tangga. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 94,37 atau dengan capaian sebesar 112,35 persen. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 maka mengalami kenaikan sebesar 10,21 persen. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara dalam pengadaan jaringan di desa-desa menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pembangunan System Elektrifikasi, Telekomunikasi Desa dan Sumber Daya.

Untuk Capaian Sasaran Rasio Desa Teraliri Listrik adalah Jumlah Desa yang teraliri listrik dibagi Jumlah Desa seluruhnya dikalikan seratus persen. Pada Tahun 2020 persentase Desa yang teraliri listrik sebesar 96,15 atau dengan capaian sebesar 105,72 persen. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 maka mengalami kenaikan sebesar 19,21 persen.

RINCIAN DESA YANG TERALIRI LISTRIK
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA		
		DESA	TERALIRI LISTRIK	BELUM TERALIRI LISTRIK
1	Kec. Bandar Sei Kijang	4	4	-
2	Kec. Langgam	7	7	-
3	Kec. Pangkalan Kerinci	4	4	-
4	Kec. Pelalawan	8	8	-
5	Kec. Bunut	9	9	-
6	Kec. Pangkalan Kuras	16	16	-
7	Kec. Bandar Petalangan	10	10	-
8	Kec. Pangkalan Lesung	9	9	-
9	Kec. Kerumutan	9	9	-
10	Kec. Ukui	11	11	-
11	Kec. Teluk Meranti	8	6	2
12	Kec. Kuala Kampar	9	7	2
JUMLAH		104	100	4

Jumlah Desa yang teraliri listrik sebanyak 100 (seratus) Desa, sedangkan desa yang belum teraliri listrik sebanyak 4 (empat) desa, atau dengan capaian realisasi sebesar 106,84 persen dari target yang ditetapkan sebesar 90,00 persen.

9. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN 2020
Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan (%)	33,12	41,25	41,25	100,00
Jumlah Kunjungan Ke Kawasan Wisata (orang)	226,034	96,666	215,291	222,67

Indikator Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 41,25 persen sementara realisasinya sebesar 41,25 persen, artinya capaian kinerjanya sebesar 100,00 persen. Adapun capaian dari Pembangunan dan Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan yang sudah mencapai 41,25 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka capaian realisasinya sebesar 33,12 persen artinya pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 8,13 persen, Persentase Fungsional dan Operasional Kawasan Teknopolitan Pelalawan diukur dari :

1. Pencapaian Indikator tersedianya Kebijakan Pembangunan dan Kelembagaan Kawasan Teknopolitan, diukur dari :

- Telah tersedia Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan yang disahkan dan disepakati bersama oleh DPRD Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang menjadi dasar dan acuan pengembangan Kawasan;
- Telah tersedia Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Ketersediaan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan dan

Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Teknopolitan Pelalawan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan tersebut memperkuat regulasi yang menjadi acuan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan yang telah tersedia sebelumnya yakni : Master Plan Kawasan Teknopolitan, Zoning Kawasan, Dokumen Amdal Kawasan dan Dokumen Perizinan Kawasan Teknopolitan.

- Bekerjasama dengan BPPT telah disusun Policy Brief Percepatan Pengembangan Techno Park Pelalawan 2020-2024. Dokumen ini memuat strategi dan arah percepatan pengembangan melalui penguatan : 1. Kapasitas Inovatif Kawasan, 2. Kesiapan Infrastruktur Kawasan dan 3. Keterlibatan Industri Inti;
 - Telah tersedia Dokumen Investmen Project Ready To Offer (i-Pro) Kawasan Techno Park Pelalawan bekerjasama dengan BKPM RI. Tujuan penyusunan i-PRO Kawasan Techno Park Kabupaten Pelalawan ini adalah sebagai pedoman untuk menawarkan Kawasan Techno Park industri hilirkelapa sawit kepada calon Investor sebagai upaya peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi & ilmupengetahuan (knowledge based economy) yang melibatkan peran Pemda, Perguruan Tinggi, lembaga riset, dan industri.
2. Pencapaian Indikator Membangun Jaringan dengan Kawasan serupa dan kerjasama Nasional dan Internasional, diukur dari :
- Tersedia MOU “Pengembangan Techno Park Pelalawan Berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi (Iptekin) Kelapa Sawit Ramah Lingkungan”, yang dilakukan oleh 6 (enam) instansi/lembaga yaitu Pemerintah Kabupaten Pelalawan, BPPT, PT PINDAD (Persero), PT Rekayasa Engineering, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI).
 - Ditetapkannya Kawasan Teknopolitan sebagai Sains Techno Park Percontohan pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
 - Tersedia Aplikasi SPINS (Scienc Techno Park Integrated Information System) sebagai aplikasi Informasi jaringan Kawasan Sains dan

Teknologi yang diwadahi oleh Kemenristekdikti

3. Layanan Pengembangan Kawasan

- Bekerjasama dengan Pusat Inovasi ST2P dan BPPT melakukan pendampingan dan layanan kepada 5 (lima) Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) Komoditi Kelapa Sawit, yakni : JJE Cleaner (Pembersih Serba Guna dari limbah minyak sawit), Inner Clemp (alat panen sawit), Praudi Express (Mesin Peraut/Pembersih Lidi Sawit), Bio Sip Compos (Limbah menjadi Pupuk Organik Cair) dan Tepung Alga (suplemen Berbahan Baku Alga).
- Untuk Produk tepung alga (Alga Dahril Pratama) dan Sabun Kosmetik berbahan baku CPO dan PKO (UD. UKM Lestari) sudah di spinn off;
- Tenant yang ada akan diintegrasikan dengan hasil output teaching Industry di ST2P yang sudah beroperasi diakhir tahun 2020, yakni : minyak goreng, sabun, coklat dan mentega

4. Pencapaian Indikator Tersedianya Infrastruktur Pendukung, diukur dari :

- Tersedianya 1 unit Ruang Manajemen Pengelola UPTD Kawasan Teknopolitan seluas 64 m² .
- Telah terbangun jalan akses masuk menuju kawasan yakni : Pembangunan Jalan dari Simpang Langgam menuju kawasan sepanjang 7,65 km (2016) dan Peningkatan Jalan dari Simpang Jalan Logging RAPP menuju Langgam sepanjang 5,93 km (2016)
- Telah terbangun Jalan Dalam Kawasan berupa Pembangunan Jalan dari Jalan Logging RAPP ke Dalam Kawasan dan Pembukaan Jalan Dalam Kawasan sepanjang ±3 km serta telah tersedia Rencana Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Teknopolitan Pelalawan.
- Dibangun Kantor Manajemen Pengelola dan jalan akses masuk sepanjang ± 900 m serta jalan aspal dari ibukota kecamatan menuju kawasan sepanjang 2 km;
- Terkait Pembangunan Jalan Dalam Kawasan, telah diusulkan pembangunan Jalan Dalam Kawasan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional satker Provinsi Riau.
- Telah tersedia jaringan internet untuk mendukung aktivitas di Gedung Kampus ST2P.
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (Pltmg)

oleh BUMD dengan kapasitas 50 Mw Tahap I. Dan akan segera dibangun jaringan listrik dari PLTMG menuju kawasan.

5. Pencapaian Indikator Pengembangan Zona Pendidikan, diukur dari :

- Tersedianya Masterplan dan DED Zona Kawasan Pendidikan
- Telah Berdiri dan Beroperasi Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan di Kawasan Teknopolitan Pelalawan. Gedung kampus ST2P terdiri dari 3 lantai dengan luas lantai 4800 m².
- Telah mendapat izin operasional dan terakreditasi untuk 2 Program Studi, yakni Agro Teknologi dan Teknik Industri dengan jumlah mahasiswa 126 orang

6. Pencapaian Indikator Pengembangan Zona Riset, diukur dari :

- Tersedianya Masterplan dan DED Zona Kawasan Riset
- Telah beroperasi Pusat Edukasi / Enterpreneurship Kelapa Sawit Teknopolitan Pelalawan bekerjasama dengan PPKS Medan dengan aktivitas utama sebagai klinik sawit .
- Target kedepan yakni segera dibangun Pusat Pembibitan Kelapa Sawit pada lahan seluas 10 ha dari 50 ha yang direncanakan sehingga petani dapat memperoleh bibit unggul dari hasil riset.
- Telah beroperasi Teaching Industry di ST2P dengan output produk : minyak goreng, sabun, coklat dan mentega

7. Pencapaian Indikator Pengembangan Zona Industri, diukur dari :

- Tersedianya Masterplan dan DED Zona Kawasan Industri
- KERJASAMA 6 PIHAK (BPPT, PEMDA PELALAWAN, DMSI, PPKS MEDAN, PT.RE, PT. PINDAD : Dalam Penyiapan & Pemberdayaan Petani Sawit Swadaya dan memiliki Pabrik Pengolahan Sendiri di Kawasan Teknopolitan.
- Telah terbangun Small Holder sebagai strategi pemberdayaan & revitalisasi petani swadaya yg dihimpun dalam Koperasi Produsen Berkah Sanggam Sejahtera melalui Pengesahan akte Pendirian Koperasi oleh Menkop UKM No : 005185/BH/M.KUKM.2/IX/2017 dengan potensi jumlah anggota mencapai 518 orang & luas lahan kebun mencapai 2.945 Ha.
- Tersedianya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan Instipor Yogyakarta dalam Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Sawit Kabupaten Pelalawan.

- Telah disepakati Pembangunan Pabrik Perkebunan Kelapa sawit Rakyat di Kawasan Teknopolitan Pelalawan dengan PT. PINDAD (Persero) dan PTPN V serta KERJASAMA DENGAN PT. WIRASENA BANGUN UTAMA : Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan
- Telah tercapai KERJASAMA DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) SEBAGAI PENGEMBANG KATALIS MERAH PUTIH : Pendampingan dan Penyediaan Teknologi Pengolahan Minyak Sawit menjadi Green Fuel di Kawasan Teknopolitan Pelalawan
- Diperolehnya dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dan Kemenko PMK terkait fasilitasi pembangunan kawasa Teknopolitan Pelalawan

Indikator Jumlah Kunjungan Ke Kawasan Wisata (orang) merupakan upaya mengembangkan pemasaran dan destinasi pariwisata. Ukuran keberhasilan sasaran Pelalawan Eksotis akan ditentukan pada pencapaian Indikator kinerjanya yaitu jumlah kunjungan wisata mancanegara dan domestik serta jumlah objek wisata yang layak dan menarik. Pengembangan pemasaran pariwisata adalah aktivitas dan upaya untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu kawasan wisata sehingga mejadi laku dan didatangi oleh wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara. Melalui pemasaran pariwisata diharapkan jumlah kunjungan akan meningkat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat/masyarakat. Pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya untuk meningkatkan atraksi wisata yang meliputi daya tarik wisata alam, budaya seta buatan sehingga jumlah objek wisata unggulan dapat bertambah dan menjadi suatu kemajuan bagi pariwisata daerah. Jumlah Kunjungan ke Objek Wisata sebagai Indikator kunci keberhasilan pengembangan pariwisata menjadi tolak ukur kemajuan pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan bagi kemajuan sektor pariwisata sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat. Capaian kinerja jumlah kunjungan ke kawasan wisata (orang) terhadap pengembangan pemasaran dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun 2020 sebanyak 21,5291 orang menurun menjadi 215,291 orang jika dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan capaian kinerja dengan persentase pada tahun 2020 adalah sebesar 222,67 persen. Adapun Program yang mendukung atas keberhasilan Indikator Kinerja ini adalah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan Pemasaran Pariwisata serta Program Pengembangan Industri Pariwisata. Walaupun target pada tahun 2020 tercapai, namun ada Penurunan Jumlah Kunjungan sebesar 4,97 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan, memberikan dampak kunjungan wisatawan ke objek wisata.

10. Analisis Pencapaian Sasaran :

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel serta Kinerja Pelayanan yang Optimum

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	% CAPAIAN KINERJA 2020
Opini AUDIT BPK, (opini)	WTP	WTP	WTP	100
Nilai SAKIP (Nilai)	CC	B	B	100
Nilai Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai)	T	ST	T	T
Persentase Indikator SPM Daerah yang tercapai (%)	68,70	87,50	69,64	79,59
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdifinisi	Terdifinisi	Terdifinisi	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90,27	84,22	80,16	95,18

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, Transparan dan akuntabel serta Kinerja Pelayanan yang Optimum, diukur melalui tercapainya indikator Opini Audit BPK, Nilai Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Persentase Indikator SPM Daerah yang tercapai, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, Indikator kinerja Opini Audit BPK di tahun 2020 sudah berhasil mencapai target. Dimana Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan tahun 2020 mendapatkan opini WTP dari BPK. Artinya, capaian indikator ini di tahun 2020 adalah 100 persen. Kondisi ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Perlu disampaikan bahwa Kabupaten Pelalawan

berhasil mempertahankan opini WTP ini selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2013. Adapun program yang mendukung indikator ini adalah Peningkatan Tata Kelola Keuangan sesuai SAP dan Peningkatan dan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/209/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 disampaikan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendapat nilai 62,65 atau dengan peringkat penilaian "B", serta diberikan Piagam Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 22 April 2021. Jika dibandingkan dengan capaian Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 yakni nilai sebesar 60,39 atau dengan predikat "B", maka mengalami kenaikan sebesar 2,26 capaian ini sesuai target atau 100 persen dari target yg sama pada tahun ini. Penilaian ini bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan memperoleh nilai 62,65 atau predikat B, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas penggunaan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah menunjukkan hasil yang baik. Rinciannya adalah sebagai berikut :

NO	Komponen Penilaian	Bobot	NILAI	
			2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30	19,95	22,11
2	Pengukuran Kinerja	25	12,80	13,31
3	Pelaporan Kinerja	15	10,64	10,64
4	Evaluasi Kinerja	10	6,26	6,00
5	Capaian Kinerja	20	10,74	10,59
6	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,39	62,65

Capaian Indikator Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Piagam Penghargaan diberikan Kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tanggal 25 April 2020 secara Nasional

menetapkan Kabupaten Pelalawan dengan skor 2,9087 dengan Status Kinerja Tinggi (T), atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018. Jika Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2019) Kabupaten Pelalawan memperoleh Hasil Capaian Realisasi Kinerja Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah yakni skor 2,8552 atau Status Tinggi, mengalami peningkatan dengan selisih skor sebesar 535. Program yang mendukung Indikator ini adalah Program Perencanaan, Peningkatan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) bidang yakni : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan yang telah mengimplementasikan SPM pada tahun 2020 dengan realisasi capaiannya yaitu : Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sebesar 83,01 persen, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 81,12 persen, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 85,94 persen, Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 22,04 persen dan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebesar 18,09 persen, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebesar 15,10, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebesar 49,78 persen, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sebesar 34,78, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sebesar 100 persen, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB) sebesar 36,70 persen, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar 43,55 persen. Perhitungan rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Pelalawan sebesar 56,84 persen. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah Jenis Pelayan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kehidupan sosial Pemerintah Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam penerapan SPMnya tahun 2020

dengan capaiannya terdiri dari : Jumlah atau persentase Anak Luar panti Sosial yang menerima Sarana prasarana pelayanan Kesos sebesar 45,68 persen, persentase Lansia yang menerima jaminan sosial sebesar 31,61 persen, Jumlah korban Bencana sebesar 89,42 persen, dan Jumlah Penyandang Cacat fisikmental yang menerima jaminan sosial sebesar 41,80 persen. Perhitungan rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebesar 52,12 persen.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang telah mengimplementasikan SPM pada tahun 2020 dengan realisasi capaiannya yaitu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini mencapai realisasi sebesar 62,09 persen, Pendidikan Dasar sebesar 79,07 persen dan Pendidikan kesetaraan (Paket A sebesar 79,44 persen, Paket B sebesar 81,21 persen dan Paket C sebesar 83,31 persen) Perhitungan rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebesar 77,02 persen.

Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut serta Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis Pelayanan Dasar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran meliputi : Pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 100,00 persen, penegakan Perundang-undangan sebesar 100,00 persen, Perlindungan Masyarakat sebesar 100,00 persen dan Pemadam Kebakaran sebesar 68,31 persen yang diukur dengan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Pelalawan mencapai realisasi sebesar 80,21 persen, Capaian Indikator Tingkat Waktu Tanggap mencapai 100,00 persen, Indikator Aparat Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi berdasarkan Sertifikasi Standar yang dilegalisasi Kemendagri sebesar 44,24 persen & Capaian Indikator Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran sebesar 67,67 persen. Sehingga perhitungan rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban & Pemadam Kebakaran 92,59 persen.

Untuk Perhitungan indikator Cakupan Perangkat Daerah yg telah mencapai target Standar Pelayanan Minimal dihitung berdasarkan rata-rata seluruh capaiannya, maka realisasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Pelalawan tahun 2020 adalah sebesar 69,64 atau capaiannya sebesar 79,59 persen.

Pencapaian persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada tahun 2020 mencapai 80,16 atau 95,18 persen dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Nilai IKM tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,11. Penurunan capaian kinerja tersebut dikarena adanya perbaikan pelayanan, atau perubahan pelayanan akibat pandemi Covid-19 yang melanda sejak bulan Maret 2020. Program yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Survey IKM Pelayanan Publik Kabupaten Pelalawan dan Kegiatan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

TABEL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI IKM
1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	83,70
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,83
3	Dinas Sosial	83,35
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	79,62
5	RSUD Selasih	77,27
6	Kantor Camat Pangkalan Kerinci	88,46
7	Kantor Camat Pelalawan	76,95
8	Kantor Camat Bunut	95,84
9	Kantor Camat Pangkalan Kuras	90,21
10	Kantor Camat Bandar Petalangan	79,94
11	Kantor Camat Pangkalan Lesung	68,17
12	Kantor Camat Ukui	60,24
13	Kantor Camat Kerumutan	66,14
14	Kantor Camat Langgam	82,48
15	Kantor Camat Bandar Sei.Kijang	88,06
16	Kantor Camat Teluk Meranti	79,21
17	Kantor Camat Kuala Kampar	78,43
18	Puskesmas Pangkalan Kerinci I	80,42
19	Puskesmas Pangkalan Kerinci II	75,65
20	Puskesmas Pelalawan	80,31

21	Puskesmas Pangkalan Kuras	80,76
22	Puskesmas Bandar Petalangan	78,36
23	Puskesmas Pangkalan Lesung	76,89
24	Puskesmas Ukui	78,28
25	Puskesmas Kerumutan	79,75
26	Puskesmas Langgam	76,74
27	Puskesmas Bandar Sei.Kijang	82,04
28	Puskesmas Teluk Meranti	87,66
29	Puskesmas Kuala Kampar	78,74
JUMLAH INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		2324,52
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (RATA-RATA)		80,16

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan SP Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : 8-1249/D3/02/2018 tanggal 17 Agustus 2018 dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada kategori “Terdefenisi” atau “Level 3” yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan praktek pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu & belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Persentase capaian kinerja sebesar 100 persen dari target. Jumlah penilaian maturitas sebesar 3,539 poin tahun 2020 meningkat sebesar 1,614 poin dari th 2016 sebesar 1,736 poin dari nilai maksimal sebesar 5 poin. Capaian ini sesuai dengan target atau 100 persen. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah & Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

11. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Jumlah Desa Maju dan Mandiri

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Jumlah Desa dengan Kategori Mandiri (desa)	4	4	16	400,00

Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Jumlah Desa maju dan Mandiri terletak pada besarnya capaian indikator jumlah desa dengan kategori Mandiri. Yang menjadi dasar dikategorikan Desa Mandiri adalah Permendagri Nomor: 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kinerja Desa, Desa berbasis Teknologi Informasi/E-Government, Pelestarian Adat dan Budaya, Inovasi, Tanggap dan Siaga Bencana, Pengaturan Investasi, Partisipasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keamanan dan Ketertiban, pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yg dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa jumlah desa yang dikategorikan Mandiri pada tahun 2020 terealisasi sebesar 16 desa, sehingga secara keseluruhan jumlah desa Kategori Mandiri di Kabupaten Pelalawan tahun 2020 berjumlah 20 desa atau dengan realisasi capaian 400,00 persen

INDEK DESA PEMBANGUNAN KATEGORI DESA MANDIRI
TAHUN 2020

NO	DESA	KODE DESA	KECAMATAN	NILAI IDM
1	Air Emas	1405012002	Ukui	0,8425
2	Bukit Gajah	1405012003	Ukui	0,8333
3	Bukit Jaya	1405012004	Ukui	0,8706
4	Kampung Baru	1405012005	Ukui	0,8240
5	Lubuk Kembang Sari	1405012007	Ukui	0,9143
6	Silikuan Hulu	1405012008	Ukui	0,8619
7	Tri Mulya Jaya	1405012009	Ukui	0,8854
8	Terantang Manuk	1405032005	Pkl. Kuras	0,8211
9	Sidomukti	1405032017	Pkl. Kuras	0,8557
10	Beringin Makmur	1405012001	Kerumutan	0,8673

11	Kuala Semundam	1405122001	Bdr Petalangan	0,8808
12	Tambun	1405122003	Bdr Petalangan	0,8549
13	Terbangiang	1405122004	Bdr Petalangan	0,8603
14	Lubuk Terap	1405122005	Bdr Petalangan	0,9141
15	Angkasa	1405122006	Bdr Petalangan	0,8287
16	Sialang Godang	1405122007	Bdr Petalangan	0,9032
17	Lubuk Raja	1405122008	Bdr Petalangan	0,8227
18	Lubuk Keranji Timur	1405122009	Bdr Petalangan	0,8508
19	Air Terjun	1405122010	Bdr Petalangan	0,8175
20	Sialang Bungkok	1405122011	Bdr Petalangan	0,8211

Sedangkan pada tahun 2019 Jumlah Desa yang dikategorikan Desa Mandiri sebanyak 4 desa. Program yg mendukung tercapainya indikator ini adalah program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

12. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Terkendalnya Kesenjangan Pendapatan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,87	4,50	2,24	49,78
Indeks Gini (Indeks)	0,334	0,320	0,329	102,82

Ukuran keberhasilan sasaran Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan terkendalnya Kesenjangan Pendapatan terletak pada besarnya capaian jumlah persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi serta Indeks Gini suatu daerah. Pada Tahun 2020 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan adalah sebesar 2,24 atau terealisasi sebesar 49,78 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka pada tahun 2020 persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 1,63 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sektor industri yang melemah, stagnasi tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang melambat, secara keseluruhan terpengaruh oleh kondisi global serta pengaruh Pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Riau Tahun 2020 yakni sebesar -1,12 persen dan tahun 2019 sebesar 2,83 persen.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh Indeks Gini tahun 2020 sebesar 0,329 atau dengan realisasi capaian sebesar 102,82 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka pada tahun 2020 persentase Indeks Gini mengalami penurunan sebesar 0,005 poin.

Secara nasional, Nilai Indek Gini mengalami fluktuasi dan mulai mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran . Namun demikian akibat adanya pandemi Covid-19 nilai Indeks Gini kembali mengalami kenaikan . Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indek Gini didaerah perkotaan tahun 2020 adalah sebesar 0,363. Sedang Indeks Gini Daerah Pedesaan adalah sebesar 0,273.

13. Analisis Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Invesatasi Daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Nilai Investasi, (Triliyun Rupiah)	242,03	107	254,89	238,22

Untuk Memajukan suatu daerah tergantung kepada perkembangan ekonomi pada suatu daerah itu perlu adanya peningkatan investasi pada daerah. Mengukur derajat pencapaian dibidang Investasi dilakukan analisa dan perhitungan investasi, sumber data investasi tersebut terdapat pada Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPSE) dengan cara mengunduh laporan triwulan secara berkala.

Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi PMA dan PMDN ditentukan pada pencapaian indikator Nilai Investasi yang masuk dalam Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tahun 2020 jumlah investasi baik PMA maupun PMDN terealisasi sebesar 254,89 triliyun atau dengan capaian sebesar 238,22 persen dari target sebesar 107 triliyun dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 12,86 triliyun. Tingginya investasi di Kabupaten Pelalawan tidak luput dari pengaruh Perbaikan Pelayanan baik dari Perangkat Daerah Teknis maupun Sistem Pelayanan pada DPMPTSP dengan dukungan Program Kegiatan Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi dan Progam Kegiatan Peningkatan Iklim dan Kemudahan Investasi.

Secara Nasional realisasi Investasi Januari sampai dengan Desember 2020 Propinsi Riau berada diperingkat 6 (enam) dengan Nilai Investasi 35,8

Triliyun Rupiah, dimana untuk PMDN peringkat 4 (empat) dengan nilai investasi 26,9 Triliyun Rupiah dan PMA peringkat 12 (dua belas) dengan Nilai Investasi 617,7 (jutaUS\$0 / 8,9 Triliyun Rupiah, sedangkan Daerah Kabupaten Pelalawan di tingkat Propinsi berada pada peringkat 5 (lima) dengan total Investasi sebesar 12, 87 Triliyun Rupiah)

14. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah dan Pendapatan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Skor Pola Pangan Harapan (%)	84,10	91,74	73,55	80,18
Pengeluaran Perkapita Penduduk	12,149,00	11,900,89	11,606,00	97,45

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM serta upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Yang menjadi ukuran keberhasilan terletak pada pencapaian indikator peningkatan pengeluaran perkapita penduduk dan peningkatan Skor Pola Pangan Harapan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tahun 2020 besarnya pengeluaran per kapita penduduk pelalawan adalah Rp. 11,606,00 (ribu) artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Pelalawan selama setahun adalah Rp. Rp. 11,606,00 (ribu). Persentase capaian kinerja sebesar 97,45 persen dari target, jika dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp. 12,149,00 (ribu) artinya, mengalami penurunan sebesar Rp. 543,00.(ribu). Adapun penyebab turunnya pengeluaran per kapita Kabupaten Pelalawan ialah pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Untuk Pengeluaran per kapita penduduk Propinsi Riau yakni sebesar sebesar Rp. 10.675,00 (ribu), maka jika dibandingkan Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Pelalawan lebih besar dari Pengeluaran per kapita penduduk Propinsi Riau

Selanjutnya Capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan, berdasarkan data pada tahun 2020 sebesar 73,55 persen atau 80,18 persen, jika dibandingkan capaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,55 persen. Skor Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Semakin Tinggi Skor Pola Pangan Harapan maka semakin beragam, bergizi seimbang dan aman. Kurang tercapainya target tersebut dikarenakan konsumsi pangan penduduk kurang beragam, bergizi dan berimbang, masih didominasi beras sehingga perlu diperbanyak pengembangan rumah pangan lestari dan diversifikasi pangan olahan lokal. Penurunan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Untuk mengukur Skor Pola Pangan Harapan (%) AKG adalah Energi Komoditas dibagi Kecukupan Gizi dikalikan 100 persen, Tidak tercapainya Skor Pola Pangan Harapan karena jumlah produk pangan lokal tidak mencukupi permintaan penduduk akan kebutuhan pangan lokal, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dianggap rawan pangan dikarenakan kekurangan produksi pangan lokal dapat diiringi oleh pasokan pangan dari luar daerah sehingga tidak terjadi kelangkaan bahan pangan.

Adapun program pendukung untuk mencapai target indikator pola pangan harapan adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan

Rawan Pangan, dengan diperoleh hasil analisa ketersediaan energi untuk tahun 2020 sebesar 2,175 kkal/kap/hr (73,55 persen)

Selanjutnya untuk Hambatan dan Kendala dalam pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan (%) yakni kurangnya produksi pangan lokal membuat perhitungan akan skor PPH menjadi rendah, hal ini juga dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 selama tahun 2019 sehingga sektor pertanian terkena imbasnya termasuk petani yang mesti mengurangi aktifitas diluar rumah dan juga pengurangan anggaran pada bidang Pertanian dan menimbulkan produksi bahan pangan terutama produksi padi mengalami penurunan.

Untuk Tahun 2020 Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Pusat melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan sebesar 85,49 persen (Angka Sementara sumber; Dari Neraca Bahan Makanan (NBM) Nasional diolah oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan) bila dibandingkan dengan pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan skor PPH sebesar 73,55 maka diperlukan peningkatan kinerja sehingga dapat melebihi atau sama dengan Skor Pola Pangan Harapan Nasional.

15. Analisis Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Destinasi Wisata Unggulan Daerah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Kontribusi PDRB Pariwisata (Miliar Rupiah)	88,65	103,16	92,30	89,48

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Pariwisata Indonesia sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa negara di dunia. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas. Pembangunan pariwisata merupakan kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan dalam melayani permintaan wisatawan. Dewasa ini Kabupaten Pelalawan sedang giat-giatnya mengembangkan potensi pariwisata dan budaya daerah. Adapun Wisata unggulan yang menjadi ikon Kabupaten Pelalawan adalah Wisata Bono yang

terdapat di Kecamatan Teluk Meranti disamping wisata lainnya seperti Objek wisata Istana Sayap di Kecamatan Pelalawan, Tugu Equator di Kecamatan Pangkalan Lesung, Danau Betung di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Danau Tajwid di Kecamatan Langgam dan lain-lain.

Objek wisata Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari jenis potensi wisata antara lain wisata alam/wisata buatan, wisata seni budaya dan wisata sejarah yang menyebar keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan. Semakin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Pelalawan juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat disekitarnya dan kecamatan pada umumnya yang terpenting lagi terhadap Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

Selain dari segi perekonomian hal lain yang sangat mendukung dalam melayani wisatawan adalah sarana lainnya seperti Hotel yang merupakan aspek yang utama yaitu pengelola hotel juga melengkapi dengan fasilitas yang mendukung agar wisatawan lebih merasa nyaman. Selanjutnya untuk diketahui bahwa Sektor Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 pada Sektor Perhotelan dan Restoran sebesar Rp. 22.575.985.797.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi disautu wilayah yang disebabkan berbagai sektor, salah satunya adalah sektor Pariwisata. Untuk mengetahui kontribusi Pariwisata yang dilihat dari variabel yakni Investasi di bidang Perhotelan, Jumlah Wisatawan dan Lama mereka tinggal. Untuk kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pariwisata Kabupaten Pelalawan tahun 2020 Atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha adalah sebesar Rp. 92,30 Milyar Rupiah, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 adalah sebesar Rp. 88,65 Milyar Rupiah artinya mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,65. Persentase capaian kinerja tahun 2020 adalah sebesar 89,48persen

16. Analisis Pencapaian Sasaran : Menurunnya Tingkat Kriminalitas

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Angka Kriminalitas	261	260	381	146,53

Angka Kriminalitas terjadi sepanjang tahun 2020 mencapai 381 kasus angka tersebut meningkat dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 121 kasus. Hal ini disebabkan semakin maraknya jenis kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta banyaknya pengangguran sehingga memicu terjadinya tindak kriminalitas di wilayah Kabupaten Pelalawan. Adapun Realisasi Angka Kriminalitas Tahun 2020 berupa CT (Cream Total) sebesar 381 kasus dan CC (Cream Clearance) sebesar 276 Kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 261 kasus kriminalitas. Angka ini didapat dari Kepolisian Resort Pelalawan

17. Analisis Pencapaian Sasaran :

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Harmonis

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	%CAPAIAN KINERJA 2020
Jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan	0	0,19	0	100,00

Indonesia merupakan Negara yang mejemuk atau beragam. Kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lain. Adanya keberagaman tersebut rawan dan berpotensi terjadi konflik sosial, bahkan bisa mengarah pada tindak kekerasan. Begitu juga dengan Kabupaten Pelalawan yang begitu banyak Suku, Budaya serta Agama, Namun dengan semangat persatuan dan kesatuan antar bangsa. Sehingga hal tersebut diatas tidak terjadi sesuai apa yang kita harapkan.

Ada beberapa faktor penyebab Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Harmonis ditentukan dengan keberhasilan pelaksanaan indikator Jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan yang ditangani. Pada tahun 2020 tidak terjadi kasus konflik sosial/kerusuhan di Kabupaten Pelalawan dengan realisasi capaian 100 persen, begitu juga pada tahun sebelumnya (2019) tidak ada terjadi kasus konflik sosial/kerusuhan. Adapun Program yang Mendukung atas keberhasilan indikator jumlah Konflik Sosial/Kerusuhan adalah Program Penanganan Gangguan Keamanan, Pencegahan Konflik Sosial dan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2020

3.1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah disusun.

Realisasi APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.1.475.150.980.456,77 atau 101,37 persen dari Tahun Anggaran 2020 yang ditarget sebesar Rp.1.455.238.355.754,96 sedangkan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.1.701.183.861.075,04 atau 107,28 persen dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.585.727.281.643,15.
- b. Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.1.654.083.767.693,90 atau 90,10 persen dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.835.781.365.551,14. Sedangkan realisasi belanja pada Tahun 2019 sebesar Rp.1.520.505.690.317,21 atau 86,06 persen dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp.1.766.766.659.103,50.

Gambaran realisasi pendapatan daerah, belanja daerah & pembiayaan daerah Tahun 2020 secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.6
Ringkasan Realisasi APBD 2020

Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4
I. Pendapatan Daerah	1.455.238.355.754,96	1.475.150.980.456,77	19.912.624.701,81
II. Belanja dan Transfer Daerah	1.835.781.365.551,14	1.654.083.767.693,90	(181.697.597.857,24)
III. Surplus (Defisit)	(380.543.009.796,18)	(178.933.257.237,13)	201.609.752.559,05
IV. Pembiayaan Daerah			0,00
a. Penerimaan Daerah	458.061.820.742,18	458.147.320.742,18	85.500.000,00
b. Pengeluaran Daerah	0,00	0,00	0,00
SILPA	0,00	279.214.063.505,05	201.695.252.559,05

Struktur belanja dalam penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan, terdiri dari 6 (enam) belanja urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) belanja urusan pilihan dan 6 (enam) urusan belanja penunjang. Setiap urusan ditangani oleh satu atau beberapa OPD sehingga memudahkan pengukuran Indikator Kinerja OPD bersangkutan.

Urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh OPD tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Urusan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan

No.	Urusan	OPD Pelaksana
A.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

	Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Lingkungan Hidup
6.	Sosial	Dinas Sosial
B.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
7.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10.	Pertanahan	Sekretariat Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18.	Penanaman Modal	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
22.	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C.	Urusan Pilihan	
24.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
25.	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
26.	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan

27	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriandan Perdagangan
28	Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
29	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
D.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
30.	Administrasi Pemerintahan	DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Ukui, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Langgam
31.	Pengawasan	Inspektorat Daerah
32.	Perencanaan	Dinas Perhubungan dan Badan Perencana Pembangunan Daerah
33.	Kuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
34.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanDaerah
35	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	148.682.087.597,96	145.365.127.301,78	97,77
1.1.1	Pajak Daerah	61.239.435.000,00	67.869.285.448,22	110,83
1.1.2	Retribusi Daerah	10.378.900.000,00	5.512.737.011,00	53,11
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.844.100.000,00	8.957.303.070,00	60,34
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	62.219.652.597,96	63.025.801.772,56	101,30
1.2	Transper Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	996.139.694.000,00	1.005.175.716.499,00	100,91
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	104.255.025.000,00	99.691.079.820,00	95,62
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	137.462.716.000,00	161.480.219.038,00	117,47

1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	602.962.236.000,00	601.518.018.390,00	99,76
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	151.459.717.000,00	142.486.399.251,00	94,08
1.2.2	Transper Pemerintah Pusat -Lainnya	41.714.809.000,00	41.714.809.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	41.714.809.000,00	41.714.809.000,00	100,00
1.3	Dana Transper Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	85.176.000.000,00	101.152.838.798,99	118,76
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.176.000.000,00	101.152.838.798,99	118,76
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	183.525.765.157,00	181.742.018.857,00	99,03
1.4.1	Hibah	62.770.285.157,00	62.888.755.157,00	100,19
1.4.2	Pendapatan lainnya	120.755.480.000,00	118.853.263.700,00	98,42
	Jumlah Pendapatan	1.455.238.355.754,96	1.475.150.510.456,77	101,37

Uraian ringkas jenis pendapatan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan sebesar Rp.145.365.127.301,78 atau 97,77 persen dari target sebesar Rp.148.682.087.597,96. Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp.67.869.285.448,22 atau 110,83 persen dari target sebesar Rp.61.239.435.000,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp.5.512.737.011,00 atau 53,11 persen dari target sebesar Rp.10.378.900.000,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.8.957.303.070,00 tercapai 60,34 persen dari target sebesar Rp.14.844.100.000,00, dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp.63.025.801.772,56 tercapai 101,30 persen dari target sebesar Rp.62.219.652.597,96.

b. Transper Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebesar Rp.1.005.175.716.499,00 atau 100,91 persen dari target sebesar Rp.996.139.694.000,00, terdiri dari realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.99.691.079.820,00 atau 95,62 persen dari target sebesar Rp.104.255.025.000,00, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

sebesar Rp.161.480.219.038,00 atau 117,47 persen dari target sebesar Rp.137.462.716.000,00, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.601.518.018.390,00 tercapai 99,76 persen dari target sebesar Rp.602.962.236.000,00, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.142.486.399.251,00 atau 94,08 persen dari target Rp.151.459.717.000,00.

- c. Transper Pemerintah Pusat-Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.41.714.809.000,00 tercapai 100 persen. Realisasi penerimaan Dana Transper Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi sebesar Rp.101.152.838.798,99 atau 118,76 persen dari target Rp.85.176.000.000,00.

- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.62.888.755.157,00 merupakan dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terealisasi sebesar Rp.59.012.270.000,00 atau 100,77 persen dari target sebesar Rp.58.893.000.000,00 dan realisasi dana Hibah bantuan dalam bentuk uang untuk pembelian alat-alat kesehatan pada masa pandemi corona virus 19 sebesar Rp.3.876.485.157,00 atau 100 persen. Sementara realisasi sebesar Rp.118.853.263.700,00 merupakan Realisasi Hibah Dana Desa sebesar Rp.106.307.280.000,00 dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi sebesar Rp.12.545.983.700,00.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah terdapat berbagai hambatan dan permasalahan terutama menyangkut:

- a. Luasnya wilayah serta keadaan geografis Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 12 kecamatan sebagian besar masih belum ditunjang dengan sarana prasarana transportasi yang memadai. Sementara sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur terutama untuk dapat menjangkau seluruh wilayah juga masih terbatas, kondisi ini menyulitkan dalam pelaksanaan pengelolaan realisasi penerimaan yang efektif dan efisien terutama tagihan penerimaan yang bersumber dari obyek pajak dan retribusi yang berasal dari masyarakat.

- b. Belum memadainya data wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- c. Belum efektifnya beberapa peraturan daerah yang berkenaan dengan sebagian besar kantor pusat perusahaan terutama usaha perkebunan berdomisili diluar wilayah kerja administratif Kabupaten Pelalawan, sehingga sulit melakukan kontak dengan pimpinan yang berwenang dalam perusahaan tersebut, sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- d. Adanya potensi Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal direalisasikan, karena kurang nya tingkat kesadaran wajib pajak baik masyarakat maupun dunia usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
- e. Lambatnya pengesahan RTRW sehingga adanya beberapa peluang investasi yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah belum dapat dilaksanakan.
- f. Adanya beberapa potensi Pajak Daerah yang kewenangannya menjadi urusan Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah adalah:

- a. Kegiatan penyuluhan subyek pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat luas terutama kepada aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Pelalawan. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
- b. Kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pendapatan daerah secara berkesinambungan bekerjasama dengan pihak yang kompeten untuk meningkatkan keterampilan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
- c. Kegiatan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah diterapkan pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi disertai dengan penerapan sanksi administrasi.

- d. Kegiatan pendataan PBB telah menyempurnakan data yang ada untuk menambah penerimaan PBB.
- e. Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara On-Line yang pada Tahun 2019 sudah di Launching dan telah diimplementasikan. Bekerja sama dengan Bank Riau Kepri, Bank Mandiri dan Bank BRI. Diharapkan dengan kemudahan ini dapat mendorong dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak.

1 Belanja Daerah

Ikhtisar Realisasi Target Kinerja Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.9
Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Belanja	1.835.781.365.551,14	1.654.083.767.693,90	90,10
1	Belanja Operasi	1.237.303.163.222,87	1.098.869.364.370,61	88,81
2	Belanja Pegawai	581.810.201.843,00	534.597.740.861,00	91,88
3	Belanja Barang dan Jasa	592.257.738.695,87	502.907.734.223,61	84,91
4	Belanja Hibah	58.561.222.684,00	56.954.889.286,00	97,26
5	Belanja Bantuan Sosial	4.674.000.000,00	4.418.400.000,00	94,53
II	Belanja Modal	375.868.478.120,69	339.905.459.458,29	90,43
1	Belanja Tanah	230.284.610,00	229.807.000,00	99,79
2	Belanja Peralatan dan Mesin	94.174.108.501,19	81.188.627.560,13	86,21
3	Belanja Gedung dan Bangunan	116.759.707.267,00	106.161.885.416,04	90,92
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.496.145.758,50	124.947.377.522,12	91,54
.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.208.231.984,00	27.377.761.960,00	97,06
III	Belanja Tak Terduga	21.937.003.619,58	11.856.600.000,00	54,05
1	Belanja Tak Terduga Bencana Alam	500.000.000,00	0,00	0,00
.2	Belanja Tak Terduga Bencana non Alam	21.437.003.619,58	11.856.600.000,00	54,05
IV	Belanja Transfer	200.672.720.588,00	203.452.343.865,00	101,39
.1	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	7.161.833.500,00	5.294.251.777,00	73,92

2	Bagi Hasil Pajak Pajak Daerah	6.123.943.500,00	5.294.251.777,00	86,45
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.037.890.000,00	0,00	0,00
4	Transfer Bantuan Keuangan	193.510.887.088,00	198.158.092.088,00	102,40
5	Bantuan Keuangan ke Desa	192.469.703.800,00	197.116.908.800,00	102,41
6	Bantuan Keuangan Lainnya	1.041.183.288,00	1.041.183.288,00	100,00
	Jumlah Belanja	1.835.781.365.551,14	1.654.083.767.693,90	90,10

Dari Tabel 3.4 dapat dikemukakan hal-hal yang berkenaan Ikhtisar realisasi belanja Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar Rp.1.098.869.364.370,61 atau 88,81 persen dari target belanja sebesar Rp.1.237.303.163.222,87 yang terdiri dari belanja pegawai terealisasi sebesar Rp.534.597.740.861,00 atau 91,89 persen dari target belanja sebesar Rp.592.257.738.695,87, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.502.908.334.223,61 atau 84,91 persen dari target belanja sebesar Rp.592.257.738.695,87, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.56.954.889.286,00 atau 97,26 persen dari target belanja sebesar Rp.58.561.222.684,00, dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp.4.418.400.000,00 atau 94,53 persen dari target belanja sebesar Rp.4.674.000.000,00.
- Belanja Modal Rp.339.905.459.458,29 atau 90,43 persen dari target belanja sebesar Rp.375.868.478.120,69 yang terdiri dari belanja tanah terealisasi sebesar Rp.229.807.000,00 atau 99,79 persen dari target belanja sebesar Rp.230.284.610,00, belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar Rp.81.188.627.560,13 atau 86,21 persen dari target belanja sebesar Rp.94.174.108.501,19, belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.106.161.885.416,04 atau 90,92 persen dari target belanja sebesar Rp.116.759.707.267,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp.124.947.377.522,12 atau 91,54 persen dari target belanja sebesar Rp.136.496.145.758,50 dan Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi

sebesar Rp.27.377.761.960,00 atau 97,06 persen dari target belanja sebesar Rp.28.208.231.984,00.

- c. Belanja tak terduga untuk bencana alam tidak terealisasi atau 0.00 persen dari target belanja sebesar Rp.500.000.000,00 dan belanja tak terduga untuk bencana non alam terealisasi sebesar Rp.11.856.600.000,00 atau 54,05 persen dari target belanja sebesar Rp.21.937.003.619,58.
- d. Belanja transfer realisasinya sebesar Rp.203.452.343.865,00 atau 101,39 persen dari anggaran sebesar Rp.200.672.720.588,00 yang terdiri dari Transfer bagi hasil pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Untuk realisasi Transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp.5.294.251.777,00 sebesar 86,45 persen dari target sebesar Rp.6.123.943.500,00, sedangkan untuk realisasi Transfer bagi retribusi daerah tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp.1.037.890.000,00. Bantuan Keuangan ke Desa terealisasi sebesar Rp.197.116.908.800,00 atau 102,41 persen dari target belanja sebesar Rp.192.469.703.800,00 dan bantuan keuangan lainnya - Partai Politik terealisasi sebesar 100 persen dari target belanja sebesar Rp.1.041.183.288,00.

Realisasi Belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer secara keseluruhan mencapai Rp.1.654.083.767.693,90 atau 90,07 persen dari target belanja sebesar Rp.1.835.781.365.551,14. Anggaran belanja tidak terserap 100 persen secara umum disebabkan karena upaya efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan adanya beberapa program/kegiatan yang tidak mencapai target.

Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu: 1) rincian belanja menurut organisasi, 2) rincian belanja menurut fungsi, 3) rincian belanja menurut program dan kegiatan, 4) rincian belanja menurut urusan pemerintahan, 5) rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung dan 6) rincian menurut jenis belanja.

Program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target umumnya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Keterlambatan penyiapan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang terbatas;
- Adanya Faktor menyangkut persyaratan dan kemampuan kontraktor yang mengikuti lelang/tender yang tidak sesuai dengan perencanaan, terkait keterbatasan waktu tender ulang tidak bisa dilaksanakan;
- Adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- Adanya rasionalisasi anggaran terkait pengurangan penerimaan dana perimbangan yang dilakukan pada APBD perubahan sehingga banyak kegiatan yang tidak terlaksana;
- Adanya kegamangan dan ketakutan pejabat pengelola kegiatan (PPTK/PPK) akan dampak/risiko hukum yang akan ditanggung.

Anggaran dan realisasi masing-masing OPD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi OPD Tahun Anggaran 2020

No.	OPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	475.909.134.273,58	440.709.895.329,44	35.199.238.944,14	92,60
2	Dinas Kesehatan	273.596.664.299,00	240.348.196.346,36	33.248.467.952,64	87,85
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.585.329.420,50	186.685.548.405,58	34.899.781.014,92	84,25
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.781.756.112,50	21.246.315.469,00	2.535.440.643,50	89,34
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.763.015.106,00	8.255.353.903,00	3.507.661.203,00	70,18
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.671.152.870,00	5.018.879.744,00	652.273.126,00	88,50
7	Dinas Sosial	11.198.077.156,00	9.273.885.758,00	1.924.191.398,00	82,82
8	Dinas Tenaga Kerja	3.983.426.809,00	3.753.706.336,00	229.720.473,00	94,23
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.890.847.511,00	11.645.449.799,00	1.245.397.712,00	90,34
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura	24.989.578.364,00	22.269.844.494,70	2.719.733.869,30	89,12

11	Dinas Lingkungan Hidup	24.689.778.118,00	21.850.543.838,19	2.839.234.279,81	88,50
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.732.171.595,00	7.925.343.398,00	806.828.197,00	90,76
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.728.343.373,00	13.619.565.825,74	1.108.777.547,26	92,47
14	Dinas Perhubungan	12.028.010.906,00	11.155.517.381,33	872.493.524,67	92,75
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.292.147.525,00	15.223.889.585,63	1.068.257.939,37	93,44
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	10.052.239.845,00	8.771.532.751,42	1.280.707.093,58	87,26
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.354.831.049,00	9.073.853.138,00	280.977.911,00	97,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.284.300.305,00	6.766.894.973,00	517.405.332,00	92,90
19	Dinas Perikanan dan Kelautan	6.730.051.471,00	6.209.837.369,84	520.214.101,16	92,27
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	50.921.318.330,00	49.250.647.925,25	1.670.670.404,75	96,72
21	Dinas Perkebunan dan Peternakan	23.273.827.665,00	21.436.558.304,00	1.837.269.361,00	92,11
22	KDH dan Wakil KDH	551.026.932,00	451.489.812,00	99.537.120,00	81,94
23	Sekretariat Daerah	64.536.504.893,00	55.146.008.867,00	9.390.496.026,00	85,45
24	Sekretariat DPRD	75.014.994.129,00	60.625.420.968,00	14.389.573.161,00	80,82
25	Kec. Bunut	5.180.749.625,00	4.904.134.022,00	276.615.603,00	94,66
26	Kec. Pangkalan Lesung	4.342.148.537,00	4.127.503.077,00	214.645.460,00	95,06
27	Kec. Kerumutan	4.365.803.520,00	4.234.096.019,00	131.707.501,00	96,98
28	Kec. Pelalawan	4.698.672.727,00	4.313.683.671,00	384.989.056,00	91,81
29	Kec. Pangkalan Kerinci	9.204.477.599,72	8.371.416.279,91	833.061.319,81	90,95
30	Kec. Bandar Sei Kijang	4.467.892.175,00	4.185.428.726,00	282.463.449,00	93,68
31	Kec. Pangkalan Kuras	5.751.296.947,00	5.519.515.205,53	231.781.741,47	95,97
32	Kec. Kuala Kampar	4.876.290.113,19	4.617.553.640,00	258.736.473,19	94,69
33	Kec. Teluk Meranti	5.176.724.869,55	4.871.488.914,00	305.235.955,55	94,10
34	Kec. Ukui	4.480.936.221,00	4.055.919.204,50	425.017.016,50	90,51
35	Kec. Bandar Petalangan	4.278.567.029,00	3.812.033.911,00	466.533.118,00	89,10
36	Kec. Langgam	5.492.683.114,00	5.364.604.438,00	128.078.676,00	97,67
37	Inspektorat Daerah	19.147.687.573,00	16.499.959.785,00	2.647.727.788,00	86,17
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.867.116.023,00	10.222.892.184,00	1.644.223.839,00	86,14
39	Badan Pengelolaan	308.728.067.409,52	301.792.565.119,48	6.935.502.290,04	97,75

	Keuangan dan Aset Daerah				
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	10.668.953.564,00	9.293.347.842,00	1.375.605.722,00	87,11
41	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.395.933.327,00	4.059.534.156,00	336.399.171,00	92,35
	JUMLAH	1.806.682.528.431,56	1.636.932.915.916,90	169.749.612.514,66	90,60

Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah pada Tahun 2020, antara lain:

- Terlambatnya pelaksanaan APBD yang disebabkan terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa oleh OPD, akibatnya waktu yang tersedia untuk pelaksanaan APBD berkurang dan selanjutnya diikuti dengan faktor alam seperti curah hujan yang cukup tinggi sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan. Akibat lebih lanjut, dana yang ada dan telah dialokasikan untuk suatu kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Terlambatnya pengesahan perubahan APBD sehingga kegiatan yang dianggarkan di perubahan tidak terlaksana secara maksimal;
- Ketakutan pelaksana kegiatan akan dampak/risiko hukum yang akan ditanggung;
- Faktor eksternal yang sebenarnya dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan kontrak perjanjian; dan

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, langkah strategis yang akan diambil adalah:

- Proses Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secepatnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas kinerja SDM aparatur; dan
- Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada tahun 2020, APBD Kabupaten Pelalawan mencatat surplus sebesar Rp.279.214.063.505,05.

Sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum memandang perlu untuk melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini antara lain dengan pertimbangan prinsip kesinambungan antar generasi, dengan kata lain kebijakan pembangunan saat ini jangan sampai menjadi beban daerah pada masa generasi berikutnya.

Adapun anggaran dan realisasi pembiayaan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 adalah dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No.	URAIAN		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		458.061.820.742,18	458.147.320.742,18	100,02
1		Penggunaan SiIPA	458.061.820.742,18	458.061.820.742,18	100,00
2		Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3		Penerimaan Deviden Tunai	0,00	0,00	0,00
4		Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	85.500.000,00	0,00
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN		458.061.820.742,18	458.147.320.742,18	100,02
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00
1		Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2		Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3		Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTO	458.061.820.742,18	458.147.320.742,18	100,02
III		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	77.518.810.946,00	279.214.063.505,05	360,19

Realisasi penerimaan pembiayaan selain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp.458.061.820.742,18. Realisasi penerimaan pembiayaan dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.12
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)
Pelampauan Penerimaan PAD	534.571.911,16
Pajak Daerah	11.332.426.899,19
Retribusi Daerah	(5.952.605.027,91)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(317.002.691,00)
Lain-lain PAD yang Sah	(4.528.247.269,12)
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	85.805.870.311,00
Bagi Hasil Pajak	14.839.150.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	96.370.050.040,00
Dana Alokasi Khusus	(25.403.329.829,00)
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan Lainnya	(492.779.200,00)
Dana Penyesuaian	(492.779.200,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	29.608.916.409,73
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	29.818.646.409,73
Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(209.730.000,00)
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	(238.677.439.903,29)
Belanja Pegawai	(37.150.650.110,76)
Belanja Barang dan Jasa	(77.448.757.343,28)
Belanja Modal	(111.101.552.597,25)
Belanja Hibah	(9.394.626.514,00)
Belanja Bantuan Sosial	(96.530.000,00)
Belanja Tidak Terduga	(1.364.249.484,00)
Belanja Bantuan Keuangan	(2.121.073.854,00)
Penghematan Pembiayaan	5.731.809.465,00
Jumlah SiIPA Tahun Lalu	458.061.820.742,18
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	85.500.000,00
Jumlah penerimaan kembali penerimaan pinjaman	85.500.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	458.147.320.742,18

3.2 Analisis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.13
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan APBD

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = 2/3
2010	38.382.025.593,18	847.618.876.825,18	4,53%
2011	46.649.861.645,47	1.134.243.349.087,47	4,11%
2012	55.629.512.175,87	1.312.050.966.193,35	4,24%
2013	71.443.863.741,21	1.338.450.187.270,21	5,34%
2014	86.278.846.807,95	1.485.407.190.108,46	5.81%
2015	109.085.093.812,87	1.311.303.333.835,76	8.32%
2016	107.077.951.960,58	1.404.762.616.079,71	7.62%
2017	181.808.597.388,70	1.465.379.972.442,88	12,41%
2018	136.697.900.750,86	1.469.020.695.865,13	9,31%
2019	155.693.478.613,31	1.701.183.861.075,04	9,15%
2020	145.365.597.301,78	1.475.150.980.456,77	9,85%
Rata - rata	103.655.373.636,53	1.359.153.031.912,45	7,63%

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas, kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2010 s/d 2020 masih sangat rendah rata-rata 7,63 persen, yaitu 2010 sebesar 4,53 persen, Tahun 2011 sebesar 4,11 persen, Tahun 2012 sebesar 4,24 persen, Tahun 2013 sebesar 5,34 persen, Tahun 2014 sebesar 5,81 persen, Tahun 2015 sebesar 8,32 persen, Tahun 2016 sebesar 7,62 persen, Tahun 2017 sebesar 12,41 persen, Tahun 2018 sebesar 9,31 persen, Tahun 2019 sebesar 9,48 persen, dan Tahun 2020 sebesar 9,85 persen

Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan pada keuangan tahun 2011 mengalami penurunan 0,42 persen dari Tahun 2010 menjadi 4,11 persen pada Tahun 2011. Tahun 2012 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,13 persen dari 4,11 persen pada tahun 2011 menjadi 4,24 persen pada Tahun 2012. Pada tahun 2013 rasio kemandirian mengalami kenaikan 1,10% dari Tahun 2012 sebesar 4,24 persen menjadi 5,34 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,47 persen dari Tahun 2013 sebesar 5,34 persen menjadi 5,81 persen. Tahun 2015 rasio kemandirian mengalami kenaikan 2,51 persen dari Tahun 2014 sebesar 5,81 persen menjadi 8,32 persen. Tahun 2016 rasio kemandirian mengalami penurunan 0,70 persen dari Tahun 2015 sebesar 8,32 persen menjadi 7,62 persen, Tahun 2017 rasio kemandirian mengalami kenaikan 4,79 persen dari Tahun 2016 sebesar 7,62 persen menjadi 12,41 persen, tahun 2018 rasio kemandirian mengalami penurunan 3,11 persen dari tahun 2017 sebesar 12,41 persen menjadi 9,30 persen, tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan 0,16 persen dari tahun 2018 sebesar 9,31 persen menjadi 9,15 persen sedangkan tahun 2020 rasio kemandirian mengalami kenaikan 0,37 persen dari tahun 2019 sebesar 9,48 persen menjadi 9,85 persen

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai

minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}}$$

Rasio Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2010 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efektifitas
1	2	3	4 = 3/2
2010	33.872.124.860,00	38.382.025.593,18	113,31%
2011	35.277.033.829,00	46.649.861.645,47	132,24%
2012	39.585.757.585,00	55.629.512.175,87	140,53%
2013	60.993.804.589,00	71.443.863.741,21	117,13%
2014	88.488.486.000,00	86.278.846.807,95	97,50%
2015	115.724.832.488,00	109.085.093.812,87	94,26%
2016	168.086.580.286,00	107.077.951.960,58	63,70%
2017	195.875.870.692,41	181.808.597.388,70	92,82%
2018	133.558.462.607,41	136.697.900.750,86	102,35%
2019	155.158.906.702,15	155.693.478.613,31	100,34%
2020	148.682.087.597,96	145.365.597.301,78	97,77%
Rata-rata	106.845.813.385,18	103.655.373.631,98	105,08%

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektifitas rata-rata tahun 2010 s/d 2020 sebesar 105,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan realisasi PAD dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,57%, capaian PAD tahun 2020 terealisasi 97,77% dari target PAD.

c. Ratio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

1) Rasio Keserasian Belanja:

Rasio Belanja Operasional

=

Total Belanja Operasi

Total Belanja

Tabel 3.15
Rasio Belanja Operasional

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = 2+3	5 = 2/4
2010	568.423.610.661,40	147.878.455.924,18	716.302.066.585,58	79,36%
2011	702.010.022.437,08	261.657.345.285,64	963.667.367.722,72	72,85%
2012	825.942.822.343,37	308.829.848.496,87	1.134.772.670.840,24	72,78%
2013	1.048.144.956.622,32	296.763.912.527,94	1.344.908.869.150,26	77,93%
2014	1.033.862.347.574,03	327.477.591.172,28	1.361.339.938.746,31	75,94%
2015	1.081.520.716.608,47	453.584.905.312,88	1.535.105.621.921,35	70,45%
2016	1.033.339.830.691,29	454.684.129.007,32	1.488.023.959.698,61	69,44%
2017	1.001.818.096.949,07	254.665.598.182,60	1.256.483.695.131,67	79,73%
2018	935.160.433.227,32	161.281.235.359,71	1.096.441.668.587,03	85,29%
2019	1.063.405.436.434,15	255.820.334.183,06	1.319.225.770.617,21	80,61%
2020	1.098.686.519.001,61	339.905.459.458,29	1.438.774.823.828,90	76,38%
Rata - rata	963.072.046.147,19	296.595.346.810,07	1.259.667.392.957,26	76,45%

Rasio Belanja Modal

=

Total Belanja Modal

Total Belanja

Tabel 3.16
Rasio Belanja Modal

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/4
2010	568.423.610.661,40	147.878.455.924,18	716.302.066.585,58	20,64%
2011	702.010.022.437,08	261.657.345.285,64	963.667.367.722,72	27,15%
2012	825.942.822.343,37	308.829.848.496,87	1.134.772.670.840,24	27,22%
2013	1.048.144.956.622,32	296.763.912.527,94	1.344.908.869.150,26	22,07%
2014	1.033.862.347.574,03	327.477.591.172,28	1.361.339.938.746,31	24,06%
2015	1.081.520.716.608,47	453.584.905.312,88	1.535.105.621.921,35	29,55%
2016	1.033.339.830.691,29	454.684.129.007,32	1.488.023.959.698,61	30,56%
2017	1.001.818.096.949,07	254.665.598.182,60	1.256.483.695.131,67	20,27%

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = 2+3	5 = 3/4
2018	935.160.433.227,32	161.281.235.359,71	1.096.399.063.587,03	14,71%
2019	1.063.405.436.434,15	255.820.334.183,06	1.319.225.770.617,21	19,39%
2020	1.098.869.364.370,61	339.905.459.458,29	1.438.774.823.828,90	23,62
Rata - rata	963.072.046.147,19	296.595.346.810,07	1.259.667.392.957,26	23,55

Dari rasio diatas diketahui bahwa belanja operasional pemerintahan masih mendominasi jumlah belanja APBD dari tahun 2010 s/d 2020, namun persentase belanja operasional dibanding total belanja Tahun 2020 menunjukkan trend penurunan sebesar 4,16% dari sebesar 80,61 persen tahun 2019 menjadi sebesar 76,37 persen pada Tahun 2020. Penurunan belanja operasi Tahun 2020 tersebut diiringi dengan kenaikan belanja modal terhadap jumlah belanja sebesar 4,16 persen, dari sebesar 19,39 persen pada tahun 2019 menjadi 23,55 persen pada tahun 2020.

2) Rasio Kesenjangan Belanja per Fungsi

Tabel 3.17
Rasio Kesenjangan Belanja per Fungsi TA 2020

Fungsi Pemerintahan Daerah	Realisasi (Rp)	Rasio
1	2	3 = (2/Jumlah Belanja)
Pelayanan Umum	571.158.866.336,05	34,53
Ketertiban dan Keamanan	34.520.549.116,00	2,09
Ekonomi	79.537.266.386,03	4,81
Lingkungan Hidup	21.850.543.838,19	1,32
Perumahan dan Fasilitas Umum	186.685.548.405,58	11,29
Kesehatan	244.292.032.103,36	14,77
Pariwisata dan Budaya	26.322.230.611,55	1,59
Pendidikan	464.815.887.699,14	28,10
Perlindungan Sosial	24.900.843.198,00	1,51
Jumlah Belanja	1.654.083.767.693,90	100,00

Dari rasio kesenjangan belanja per fungsi TA 2020 tersebut terlihat bahwa fungsi pemerintahan daerah yang mendapat prioritas

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan adalah pelayanan umum, pendidikan serta Kesehatan.

Alokasi anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020 diatas 10 persen dikarenakan adanya prioritas pembangunan Kabupaten Pelalawan saat ini diutamakan adalah memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik. Kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Pelalawan belum semua daerah terpenuhi. Dengan alokasi anggaran yang diberikan pada bidang kesehatan saat ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah optimal yakni dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk di puskesmas, dan pelayanan kesehatan rujukan gratis bagi lebih kurang 45 persen penduduk, sementara penduduk miskin di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 sebesar 9,62 persen menurun 0,11 persen dari tahun 2018 sebesar lebih kurang 9,73 persen.

d. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintahan daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih / kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

Tabel 3.18
Rasio Pengelolaan Belanja

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = 2/3
2010	847.618.876.825,18	755.773.476.585,58	112,15%
2011	1.134.243.349.087,47	1.011.938.175.602,72	112,09%
2012	1.312.050.966.193,35	1.147.776.021.252,42	114,31%
2013	1.338.450.187.270,21	1.345.054.743.351,26	99,51%
2014	1.485.407.190.108,46	1.473.927.741.146,31	100,78%

2015	1.311.303.333.835,76	1.684.164.043.497,35	77,86%
2016	1.404.727.616.079,71	1.639.133.494.244,61	85,70%
2017	1.465.379.972.442,88	1.434.664.887.985,67	102,14%
2018	1.469.020.695.865,13	1.279.027.719.741,03	114,85%
2019	1.701.183.861.075,04	1.520.505.690.317,21	111,88%
2020	1.475.150.980.456,77	1.654.083.767.693,90	112,28%
Rata - rata	1.359.149.850.094,27	1.358.733.155.128,91	100,03%

Rasio pengelolaan belanja tersebut menunjukkan bahwa jumlah belanja tahun 2020 meningkat dan pendapatan mengalami penurunan sehingga Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk tahun 2020 mengalami defisit, sehingga Kabupaten Pelalawan mendanai defisit belanja dari sisa anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

1) Persentase Pertumbuhan PAD

Persentase pertumbuhan = $\frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100$

Tabel 3.19
Rasio Persentase Pertumbuhan PAD

Tahun	PAD tahun p-1 (Rp)	PAD tahun p (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2010	29.980.587.977,16	38.382.025.593,18	28,02%
2011	38.382.025.593,18	46.649.861.645,47	21,54%
2012	46.649.861.645,47	55.629.512.175,87	19,25%
2013	55.629.512.175,87	71.443.863.741,21	28,43%
2014	71.443.863.741,21	86.278.846.807,95	20,76%
2015	86.278.846.807,95	109.085.093.812,87	26,43%
2016	109.085.093.812,87	107.077.951.960,58	-1,84%
2017	107.077.951.960,58	181.808.597.388,70	69,79%

Tahun	PAD tahun p-1 (Rp)	PAD tahun p (Rp)	Rasio
2018	181.808.597.388,70	136.697.900.750,86	-24,81%
2019	136.697.900.750,86	155.693.478.613,31	13,91%
2020	155.693.478.613,31	145.365.597.301,78	-6,63%
Rata - rata	92.610.595.210,38	103.100.141.512,62	11,33%

2) Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Persentase

Pertumbuhan

Total Pendapatan

=

Pendapatan tahun p – Pendapatan tahun p-1

x 100

Tabel 3.20

Rasio Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

Tahun	Pendapatan tahun p-1 (Rp)	Pendapatan tahun p (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2010	704.208.616.335,31	847.618.876.825,18	20,36%
2011	847.618.876.825,18	1.134.243.349.087,47	33,82%
2012	1.134.243.349.087,47	1.312.050.966.193,35	15,68%
2013	1.312.050.966.193,35	1.338.450.187.270,21	2,01%
2014	1.338.450.187.270,21	1.485.407.190.108,46	10,98%
2015	1.485.407.190.108,46	1.311.303.333.835,76	-11,72%
2016	1.311.303.333.835,76	1.404.762.616.079,71	7,13%
2017	1.404.762.616.079,71	1.465.379.972.442,88	4,32%
2018	1.465.379.972.442,88	1.469.020.695.865,13	0,25%
2019	1.469.020.687.452,13	1.701.183.861.075,04	15,80%
2020	1.707.295.191.285,04	1.475.150.980.456,77	-13,60%
Rata - rata	1.289.067.362.446,86	1.359.153.031.912,45	5,44%

3) Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

Persentase Pertumbuhan

=

Belanja Operasi p – Belanja Operasi tahun p-1

x 100

Tabel 3.21

Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Operasional

Tahun	Belanja Operasi tahun p-1 (Rp)	Belanja Operasi tahun p (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2010	516.348.695.791,05	568.423.610.661,40	10,09%
2011	568.423.610.661,40	702.010.022.437,08	23,50%

Tahun	Belanja Operasi tahun p-1 (Rp)	Belanja Operasi tahun p (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2012	702.010.022.437,08	825.942.822.343,37	17,65%
2013	825.942.822.343,37	1.048.144.956.622,32	26,86%
2014	1.048.144.956.622,32	1.033.862.347.574,03	-1,36%
2015	1.033.862.347.574,03	1.081.520.716.608,47	4,68%
2016	1.081.520.716.608,47	1.033.339.830.691,29	-4,45%
2017	1.033.339.830.691,29	1.001.818.096.949,07	-3,05%
2018	1.001.818.096.949,07	935.160.433.227,32	-6,65%
2019	935.160.433.227,32	1.063.405.436.434,15	13,71%
2020	1.063.405.436.434,15	1.098.869.364.370,61	3,33%
Rata - rata	891.816.088.121,78	944.772.512.538,10	5,94%

4) Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

Persentase Pertumbuhan = $\frac{\text{Belanja Modal p} - \text{Belanja Modal tahun p-1}}{\text{Belanja Modal tahun p-1}} \times 100$

Tabel 3.22
 Rasio Persentase Pertumbuhan Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal tahun p-1 (Rp)	Belanja Modal tahun p (Rp)	Rasio
1	2	3	4 = (3-2) / 2
2010	302.294.499.982,80	147.878.455.924,18	-51,08%
2011	147.878.455.924,18	261.657.345.285,64	76,94%
2012	261.657.345.285,64	308.829.848.496,87	18,03%
2013	308.829.848.496,87	296.763.912.527,94	-3,91%
2014	296.763.912.527,94	327.477.591.172,28	10,35%
2015	327.477.591.172,28	453.584.905.312,88	38,51%
2016	453.584.905.312,88	454.684.129.007,32	0,24%
2017	454.684.129.007,32	254.665.598.182,60	-43,99%
2018	254.665.598.182,60	161.281.235.359,71	-36,67%
2019	161.281.235.359,71	255.820.334.183,06	58,62%
2020	255.820.334.183,06	339.905.459.458,29	32,87%
Rata – rata	293.176.168.675,94	296.595.346.810,07	1,17%

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Pelalawan pada TA 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif. Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Pelalawan pada tahun

2020 sebesar negatif 13,60 persen mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 16,22 persen. Penurunan yang paling tinggi disebabkan karena tidak tercapainya target pendapatan yang bersumber dari dana transfer sebagai akibat dari pandemi covid 19.

Pertumbuhan PAD tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar negatif 6,63 persen jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,91 persen. Hal tersebut disebabkan karena tidak tercapainya target realisasi dua pos PAD yakni Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Belanja Kabupaten Pelalawan yaitu belanja operasi mengalami penurunan menjadi 3,29 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 13,71 persen. Belanja modal Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan menjadi 32,87 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 58,62 persen. Rata-rata rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2010 s/d 2020 sebesar 5,94 persen. Rata-rata rasio pertumbuhan Belanja Modal tahun 2010 s/d 2020 sebesar 1,17 persen. Tahun 2020 belanja pegawai mengalami penurunan, sementara belanja barang dan jasa mengalami peningkatan dari tahun 2019.

Dari analisa rasio pertumbuhan di atas kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan pada Tahun 2020, hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid 19 yang menyebabkan adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah maupun dari target pendapatan transfer. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pelalawan masih mampu melakukan peningkatan pada Belanja Modal Tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah merupakan perwujudan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran secara periodic (berdasarkan tahun anggaran) atau bisa juga dikatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan perwujudan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif Lembaga/ Instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat.

A. KESIMPULAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan amanahnya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Perubahan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Perjanjian Kinerja Bupati Pelalawan Tahun 2020.
- 2) Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Sasaran, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
- 3) Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan gambaran bahwa keberhasilan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara

B. PERMASALAHAN

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah:

- 1) Sebagian besar instansi Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah memahami cara penyusunan Laporan Kinerja, karena keterbatasan waktu dan kurangnya penyampaian data oleh Perangkat Daerah menghambat pengumpulan data dan penyusunan menjadi terlambat.
- 2) Belum adanya standar yang valid dan akurat sebagai acuan kinerja kegiatan kegiatan dan sasaran-sasaran yang dilaksanakan mengakibatkan indikator kinerja dan satuan pengukurannya sering kali bias dan sulit ditelusuri, antara lain satuan pengukuran kinerja outcome masih menggunakan persentase sehingga data tersebut akan tergantung dengan data lain dan sifat (uncontrollable) yang tentunya indikator kinerjanya yang bias dan semu.

C. SARAN

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang baik.
- 2) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- 4) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah dan dunia usaha

- 5) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap satuan kerja perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
- 6) Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.

Segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengharapkan laporan Kinerja (Lkj) tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban pelaporan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan serta sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan yang berguna dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya.

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

